Periode: Semester Gasal 2018/2019

Skema Abdimas: Abdimas Mandiri Dosen

LAPORAN AKHIR

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SINERGITAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

(Studi Kinerja Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Makassar)

Oleh:

Prof. Dr. Mariana Tenreng, SE, M.Si.

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2019

SINERGITAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

(Studi Kinerja Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Makassar)

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis paradigma Sinergitas pengelolaan persampahan di Kota Makassar. Berdasarkan jenis penelitiannya yang dimana menggunakan metode penelitian kualitatif,Penelitian ini menggunakan pendekatan *Fenomenologi* untuk mengetahui penilaian atau tanggapan responden terhadap sinergitas pengelolaan persampahan terkait pelayanan kebersihan kota Makassar Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Fokus Masalah Penelitianbagaimana sinergitas pengelolaan persampahan di Kota Makassar?, Bagaimana strategi yang efektif dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar , Apa factor yang dominan dalam pengelolaan persampahan pada MakassarTehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:Teknik Interview mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara,Observasi,Dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan dengan cara:Perpanjangan pengamatan, Peningkatan ketekunan peneliti dalam pengamatan dan wawancara, Triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah: Pengumpulan data (*data collection*), Mereduksi data (*data reduction*),. Menyajikan data (*data display*), Penarikan kesimpulan (*drawing*)

Keywords: Sampah, Pengelolaan,Sinergitas, Efektif, Dinamis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Motivasi 6
2.1.1 Pengertian Motivasi 6
2.1.2 Tiga Jenis Motivasi David McClelland 7
2.1.3 Teori Motivasi Kebutuhan Maslow 9
2.2 Kompensasi 9
2.2.1 Pengertian Kompensasi 9
2.2.2 Faktor-Faktor Pemberian Kompensasi 10
2.3 Kepuasan Kerja 11
2.3.1 Kepuasan Kerja 11
2.4 Kinerja Karyawan 11
2.4.1 Pengertian Kinerja 11
2.4.2 Penilaian Kinerja 12
2.5 SAMPAH 13
2.6 Kinerja Pegawai 14
BAB III METODE PENELITIAN 17
3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian 17
3.2 Pendekatan Penelitian 17
3.3 Sumber Data 17
2.3.1 Sumber Data Primer. 17

2.3.2 Sumber Data Sekunder. 18
2.3.3 Fokus Masalah Penelitian 18
2.3.4 Instrumen Penelitian 18
2.3.5 Teknik Pengumpulan Dan Pengabsahan Data 18
2.3.6 Teknik Analisa Data 19
BAB IV PEMBAHASAN DAN PROFIL KOTA MAKASSAR 20
4.1 PROFIL KOTA MAKASSAR 20
4.2 Letak Geografis KotaMakassar 21
4.3 Keadaan Penduduk 23
4.4 Visi Kota Makassar 23
4.5 Misi Kota Makassar 25
4.6 Kecamatan Tamalanrea 27
4.7 Kacamatan Manggala 27
4.8 Kecamatan Wajo 28
BAB V PEMBAHASAN 29
5.1 Sampah Di Kota Makassar 33
5.1.1 TimbulanSampah 33
5.1.2 Teknis Pembuangan Sampah 34
5.1.3 Konsep Pelaksanaan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa 35
5.1.4 Kegiatan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa 40
5.1.5 Pelibatan Elemen Pendukung 42
5.1.6 Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa 44
5.1.7 Timbulan Sampah Perkotaan di Kota Makassar 46
5.1.8 Perubahan Gaya Hidup + Sampah 47

5.1.9 Timbulan sampah dan Status Kesehatan Masyarakat 48

5.2 KENDALA 49

5.2.1 Partisipasi Warga 49

5.2.2 Kinerja Pelayanan Pemerintah 50

5.2.3 Investasi dan Teknologi 51

5.2.4 Membangun optimalitas Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah. 54

5.2.5 Fenomena sampah dan ketersediaan petugas kebersihan 58

5.2.6 Sinergitas Pengelolaan Persampahan Di Kota Makassar 64

5.2.7 Model Pengangkutan Sampah Wilayah Perumahan 67

5.2.8 Model Perencanaan Pengangkutan Sampah Kawasan Kompleks Perumahan 68

5.2.9 Pengangkutan Sampah Kawasan Perdagangan 70

5.2.10 Pengorganisasian Pengelolaan Persampahan Pada Tingkat Operasional Lapangan 74

5.2.11 Pengarahan 76

5.2.12 Pengawasan dan Pengendalian 77

5.3 Strategi Yang Efektif Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Makassar 77

5.4.4 Pengawasan pada tingkat operasional lapangan 77

5.4 Factor yang dominan dalam pengelolaan persampahan pada Makassar 83

5.4.1 Optimalisasi fungsi manajemen dalam pengolaan persampahan 83

5.4.2 Pola Kerjasama Dalam Lingkup Pegawai Operasional Kebersihan 84

5.4.3 Pola Kerjasama Pegawai Administrative dan Pegawai Operasional 85
5.4.4 Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat 85
5.4.5 Komunikasi Dinas lingkungan hidup Dengan Masyarakat 89
5.5 Proposisi 92
BAB VI KESIMPULAN 93
6.1 KESIMPULAN 93
6.2 REKOMENDASI 93
DAFTAR PUSTAKA 95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena persampahan menjadi hal yang sangat krusial, Khususnya di Kota Makassar dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, menghasilkan sekitar 4500 m^3 sampah setiap harinya, volume sampah di Kota Makassar bertambah 200 ton per hari, dimana setiap bulannya sampah berkisar antara 600 ton – 800 ton, sehinnga bisa di prediksi kalau Volume sampah di Kota Makassar cukup tinggi. Kota dengan luasan 177.557 ha, ini mampu memproduksi sampah hingga 550 ton, atau sekira 4.000 meter kubik per hari, sedangkan dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar hanya mampu menangani sekitar 3500m^3 setiap hari. Berarti, ada sekitar 1000m^3 sampah di Kota Makassar yang tidak tertangani di tengah masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar, volume sampah di Makassar tahun 2013 mencapai 500-550 ton atau sekitar 4.000 meter kubik per hari. Dan jika musim buah, volume sampah lebih tinggi bisa mencapai dua kali lipat. Sampah paling banyak disumbang oleh daerah penduduk tinggi yakni kecamatan Rappocini, Tallo, Bantoloa, dan Tamalanrea. Data terakhir volume sampah tahun 2014 mencapai 800 ton per hari. Memperhatikan fakta tersebut, maka diperlukan sebuah model pengelolaan persampahan yang menyeluruh mulai dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), sampai kepada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mana didalamnya melibatkan semua pihak terkait termasuk seluruh masyarakat. Diharapkan dengan model tersebut bisa mengurangidampak yang diakibatkan oleh masalah persampahan, terutama dampak kesehatan masyarakat.

Dengan kualitas kesehatan masyarakat yang meningkat maka pada akhirnya meningkatkan pula produktifitas mereka.

Kota Makassar adalah salah satu kota besar yang menghasilkan produksi sampah kurang lebih 60 ribu kubik atau setara 250 – 300 ton per harinya. Jumlah penduduk kota Makassar saat ini mencapai sekitar 1,3 juta jiwa, diperkirakan menghasilkan sekitar 3800 m^3 sampah perkotaan setiap harinya. Dengan perkiraan jumlah penduduk yang akan mencapai sekitar 2,2 juta jiwa pada tahun 2015, diperkirakan produksi sampah tiap orang sekitar 0.3 m^3 per hari, menghasilkan total 4,500 m^3 sampah tiap hari. Ini akan menjadi masalah yang serius apabila tidak terdapat rencana dan pengelolaan sampah padat perkotaan yang memadai

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku dan paradigma masyarakat tentang “sampah” itu sendiri, hal ini perlu dilakukan secara bersama dan kerja ekstra dalam mensosialisasi serta mengaplikasi hal persampahan ini.

Pandangan sangat menarik dari para ekolog yang menyatakan bahwa semua organisme dalam tata kehidupan ekosistem pasti akan menghasilkan sampah. Bagi mereka yang peka, tentunya membenarkan pernyataan tersebut, bagaimana bisa demikian ? Setiap jasad yang hidup di alam bergerak dinamis dan sampah

merupakan salah satu hasil dari ragam bentuk kegiatan semua mahkluk hidup yang ada di alam.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (sustainable) yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU.No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.Namun aplikasi di lapangan, apalagi melibatkan masyarakat dan pengusaha masih dirasakan kurang, malah kelihatan masyarakat tidak/kurang tahu ada undang-undang yang mengatur persampahan ini. dan tentu diharapkan para stacholder perlu mengapresiasi masalah ini, masyarakat/lembaga social masyarakat perlu memantau dan mengawasi pelaksanaan dari regulasi persampahan ini, demi meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama sebagaimana dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah antar Kab/Kota yang berdekatan dan/atau bertetangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah akan diatur dalam peraturan menteri begitu bunyi dalam UU.No. 18 Tahun 2008 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sebenarnya hal ini tidak perlu diatur lagi oleh menteri, cukup pemerintah provinsi saja yang membuat kebijakannya dengan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tersebut, Gubernur sebagai perpanjangan tangan presiden di daerah. Kalau harus lagi menteri yang turut campur kerja sama antardaerah (Kab/Kota) terlalu panjang birokrasi itu, akhirnya bisa lagi undang-undang ini tidak efisien dan

efektif. Hal ini juga yang menghambat kreatifitas Pemerintah Kab/Kota dalam membuat peraturan daerah (Perda), Hal ini pula yang kurang atau tidak disenangi oleh para investor dalam pengelolaan/daur ulang sampah ini, dan sebaiknya pula disini, selain Menteri Dalam Negeri, juga mestinya melibatkan kementerian terkait lainnya, khususnya kementerian yang menginisiasi kerja sama antardaerah selama ini seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), atau kementerian lainnya yang terkait. Karena hal pengelolaan sampah ini harus melibatkan beberapa kementerian, misalnya Kementerian Koperasi, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Perkebunan/Pertanian. Masalah sampah ini memang bukan masalah kecil tapi masalah besar dan perlu serius penanganannya, hal ini yang keliru selama ini, dan lagi paradigma yang sudah berbeda/bertentangan serta tidak terjadi sinergi didalamnya (terjadi ego sektoral).

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Dalam undang-undang ini telah diwajibkan kepada Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan, Khusus kawasan industri sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk melaksanakan masalah persampahan ini. tinggal corporate tsb yang ada dalam kawasan itu, peduli dan mengefektifkan dana CSR nya, dengan melibatkan masyarakat atau pengusaha sekitar kawasan /perusahaan tersebut, disini terjadi fungsi ganda, kepedulian akan lingkungan sehat sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bukankah hal ini merupakan salah satu cara mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi pengangguran, khususnya di perkotaan.

Selain itu yang takkala pentingnya adalah petugas kebersihan yang memiliki andil yang cukup besar, dalam menjadikan kota

Makassar sebaga kota yang bersih, peran mereka tidaklah kecil, aktivitas yang mereka lakukan merupakan suatu pengabdian yang luar biasa, dalam keseharian mereka terjung kelapangan baik subuh,pagi siang sore Mupun malam hari, sementara dari sisi lain aspek kesehatan dan penghargaan dalam bentuk gaji belum memenuhi standard hidup yang cukup, para petugas rentan akan sakit yang ditimbulkan oleh sampah yang beragam, sementara bila mereka sakit bantuan santunan kesehatan masih sangat minim.sebagai pilar penguatan ekonomi tentunya kontribusi mereka tidaklah kecil,berangkat dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik meneliti : **Sinergitas Pengelolaan Persampahan (Studi Kinerja Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinergitas pengelolaan persampahan di Kota Makassar?
2. Bagaimana strategi yang efektif dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar?
3. Apa faktor yang dominan dalam pengelolaan persampahan pada Makassar?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sinergitas pengelolaan persampahan di Kota Makassar?
2. Untuk mengetahui strategi yang efektif dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar?
3. Untuk mengetahui factor yang dominan dalampengelolaan persampahan pada Makassar?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Motivasi

2.1.1 Pengertian Motivasi

Robbins (2006) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran. Meski motivasi umum terkait dengan upaya ke arah sasaran apa saja, dalam konteks organisasi maka motivasi berfokus pada tujuan organisasi agar mencerminkan minat tunggal pegawai terhadap perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Gibson dan Donnelly (1997) motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seorang pegawai yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Jadi lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu rangkaian kegiatan pemberian dorongan, yaitu bukan hanya kepada orang lain tetapi juga pada diri sendiri. Sehingga melalui dorongan ini diharapkan akan dapat bertindak kearah tujuan yang diinginkan. Flippo (1993) menyatakan bahwa dampak motivasi yang diinginkan manajemen dari pegawai sangat dipengaruhi oleh penilaian pegawai atas (1) *valensi* atau nilai yang diharapkan berupa hasil yang dinikmati karenamelakukan perilaku yang ditentukan dan (2) kuatnya pengharapan (*expectancy*) bahwa perilaku itu akan benar-benar merealisasi hasil tersebut.

Kreitner dan Kinicki (2007), mengartikan motivasi adalah proses-proses psikologis meminta, mengarahkan, dan menetapkan sukarela yang mengarah pada tujan. Greenberg (2000), berpendapat bahwa motivasi adalah dorongan ketika suatu proses dapat membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku manusia terhadap pencapaian beberapa

tujuan. Gibson *et.al*, (2001), motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menguraikan suatu kekuatan pada atau sekitar individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi di sini merupakan dorongan dan kemauan yang kuat dari seseorang individu untuk mengubah perilakunya. Winardi (2001), mengemukakan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang memaksa orang tersebut untuk bertindak melakukan sesuatu.

2.1.2 Tiga Jenis Motivasi David McClelland

a. Kebutuhan Akan Prestasi (n-ACH)

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. Kebutuhan ini pada hirarki Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri inidividu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah. n-ACH adalah motivasi untuk berprestasi , karena itu karyawan akan berusaha mencapai prestasi tertingginya, pencapaian tujuan tersebut bersifat realistis tetapi menantang, dan kemajuan dalam pekerjaan. Karyawan perlu mendapat umpan balik dari lingkungannya sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasinya tersebut.

b. Kebutuhan Akan Kekuasaan (n-pow)

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini

pada teori Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. n-pow adalah motivasi terhadap kekuasaan. Karyawan memiliki motivasi untuk berpengaruh terhadap lingkungannya, memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk menang. Ada juga motivasi untuk peningkatan status dan prestise pribadi.

c. Kebutuhan Untuk Berafiliasi atau Bersahabat (n-affil)

Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi.

McClelland mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki kombinasi karakteristik tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja atau mengelola organisasi.

Dalam teorinya McClelland mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia.

Teori ini memfokuskan pada tiga kebutuhan yaitu kebutuhan akan prestasi kebutuhan, kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Model motivasi ini ditemukan diberbagai lini organisasi, baik staf maupun manajer. Beberapa

karyawan memiliki karakter yang merupakan perpaduan dari model motivasi tersebut.

2.1.3 Teori Motivasi Kebutuhan Maslow

Maslow menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawaan (Marihot Tua E.H., 2002). Hipotesis Maslow mengatakan bahwa lima jenjang kebutuhan yang bersemayam dalam diri manusia terdiri dari :

1. Fisiologis, antara lain kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kebutuhan jasmani lain.
2. Keamanan, antara lain kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional.
3. Sosial, antara lain kasih sayang, rasa saling memiliki, diterima-baik, persahabatan.
4. Penghargaan, antara lain mencakup faktor penghormatan diri seperti harga diri, otonomi, dan prestasi; serta faktor penghormatan diri luar seperti misalnya status, pengakuan dan perhatian.
5. Aktualisasi Diri, merupakan dorongan untuk menjadi seseorang atau sesuai ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, danpemenuhan kebutuhan diri.

2.2 Kompensasi

2.2.1 Pengertian Kompensasi

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Mathis dan Jackson, 2000). Hani Handoko (1993) menyatakan bahwa kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka diantara

para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Kompensasi acapkali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi (Mutiara S. Panggabean, 2002).

Hasibuan (2007: 117) mendefinisikan kompensasi sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial (*financialreward*) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya, bentuk kompensasi adalah finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung, dimana uang langsung diberikan kepada pegawai, ataupun tidak langsung dimana pegawai menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non moneter, sedangkan menurut Gomez dalam Sulistiyani (2004: 231) kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja yang dilakukan pegawai.

2.2.2 Faktor-Faktor Pemberian Kompensasi

Menurut Robert L. Marthins dan John H. Jackson (2002; hal. 129-13 1) setiap orang ingin diperlakukan secara adil di semua aspek kompensasi, termasuk gaji pokok, insentif dan tunjangan. Dalam pemberian kompensasi bagi karyawan, perusahaan perlu mempertimbangkan konsep kelayakan dan keadilan. Dengan konsep ini diharapkan akan dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan serta menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi karyawan. Pertimbangan pemberian kompensasi bagi karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam perusahaan

dan faktor-faktor yang datang dari luar perusahaan Faktor-faktor dari dalam perusahaan yang mempengaruhi kebijakan pemberian kompensasi bagi karyawan adalah:

a. Berat ringannya suatu pekerjaan.
b. Kemampuan kerja dari karyawan tersebut..
c. Jabatan atau pangkat.
d. Pendidikan.
e. Lama bekerja.
f. Kemampuan perusahaan

2.3 Kepuasan Kerja

2.3.1 Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja menurut Robbins (2006) rmerupakan sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dengan imbalan yang disediakan pekerjaan. Kepuasan atau ketidakpuasan karyawan tergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan. Apabila yang didapat karyawan lebih rendah dari yang diharapkan, maka akan menyebabkan karyawan tidak puas.

Menurut Handoko (2005: 193) bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang mana para pegawai memandang pekerjaan mereka. Sedangkan menurut Hasibuan (2003: 123), kepuasan kerja adalah keadaan emosional pegawai di mana terjadi atau pun tidak terjadi titik temu nilai balasan jasa yang kerja pegawai dari organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh pegawai yang bersangkutan.

2.4 Kinerja Karyawan

2.4.1 Pengertian Kinerja

Kinerja mengacu pada hasil kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja yang nyata dengan standar kerja yang ditetapkan (Dessler, 2007). Menurut pengertian Hasibuan (1997), kinerjamerupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Lebih lanjut Hasibuan juga menyimpulkan bahwa apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula. Menurut Malthis (2007) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi seorang karyawan dalam bekerja, yaitu :

1. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut.
2. Tingkat Usaha yang dicurahkan.
3. Dukungan organisasi

Kinerja individual ditingkatkan sampai pada tingkatan dimana ketiga komponen tersebut ada pada dalam diri karyawan, akan tetapi kinerja berkurang apabila salah satu faktor diatas tidak ada pada diri karyawan.

2.4.2 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan proses mengukur kinerja, baik kinerja karyawan. Penilaian inerja menitikberatkan Penilaian kinerja menitikberatkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari seorang karyawan yang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Tujuan diadakannya penilaian kinerja bagi karyawan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Tujuan Evaluasi

   Pemimpin menilai kinerja karyawan pada masa lampau yang bertujuan untuk keperluan keputusan – keputusan promosi, demosi, terminasi dan kompensasi.

2. Tujuan Pengembangan

   Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi karyawan.

Penilaian kinerja merupakan bagian penting dalam proses pengembangan SDM, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Bagi organisasi atau perusahaan, hasil dari penilaian karyawan penting arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan dalam proses pengembangan karyawan, sedangkan bagi karyawan yang bersangkutan, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik mengenai kemampuan, kekurangan, serta potensi karyawan tersebut.

2.5 SAMPAH

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat an-organic yang dianggap tidak berguna dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota. (SNI 19-2454-2002).

Sampah adalah bahan sisa baik bahan-bahan yang tidak berguna lagi (barang bekas) maupun barang yang sudah tidak diambil bagian utamanya lagi. Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan. (Nur Aini Ulin Hikmah, 1999).

Sedangkan menurut A. Tresna Sastrawijaya, 1991; sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat terurai oleh mikroorganisme pengurai sehingga dalam waktu lama akan mencemari tanah. Sampah ialah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian utamanya dengan pengolahan.

Sampah yang merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, antara lain (Tchobanoglous, 1993) : Masalah estetika dan kenyamanan.

1. Merupakan sarang atau tempat berkumpulnya berbagai binatang yang dapat menjadi vektor penyakit.
2. Menyebabkan terjadinya polusi udara, air dan tanah.
3. Menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran-saluran air buangan dan drainase.

Sampah ialah semua jenis benda atau barang bangunan/kotoran manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari aktivitas kehidupan manusiadalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menimbulkan dan ataumengakibatkan pengotoran terhadap air, tanah dan udara sehingga dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan hidup manusia (R, Soemandi.2008).

Berdasarkan jenis sampah pada prinsipnya dibagi 3 bagian besar, yaitu :

1. Sampah padat.
2. Sampah cair.
3. Sampah dalam bentuk gas.

2.6 **Kinerja Pegawai**

Pengertian kinerja pada dasarnyaadalah kegiatan dan hasilyang dapat dicapai atau dilanjutkanseseorang atau

sekelompokorang di dalam pelaksanaan tugas,pekerjaan dengan baik, artinyamencapai sasaran atau standarkerja yang telah ditetapkan sebelumdan atau bahkan dapat melebihistandar yang ditentukan olehperusahaan pada periode tertentu,(Handoko, 2002: 135 dalam Mulyanto dan Dyah, 2010). Kinerja adalah gambaran mengenaitingkat pencapaian pelaksanaansuatu kegiatan atau programatau kebijakan dalam mewujudkansasaran, tujuan, misi an visiorganisasi yang tertuang dalamrencana strategi suatu organisasi.

Mengacu pendapat tersebut di atasdapat diambil kesimpulan bahwakinerja adalah hasil kerja yang dicapaioleh seorang karyawan melaluisuatu pelaksanaan pekerjaanatau tugas yang dibebankan kepadanyasesuai dengan waktu yangtelah ditentukan, bermutu, tepatmengenai sasaran dengan selalumengikuti metode yang telah ditetapkan(Mahsun, 2006:25 dalam Mulyanto dan Dyah, 2010), sedangkankinerja dapat didefinisikan sebagaihasil yang dicapai oleh seseorangmenurut ukuran yang berlakubagi pekerjaan yang bersangkutan(Handoko, 2000: 135 dalam Mulyanto dan Dyah, 2010).

Performance atau kinerja menurutPrawirosentono (2000:66) dalam Mulyanto dan Dyah (2010)adalah hasil kerja yang dapat dicapaioleh seseorang atau sekelompokorang dalam suatu organisasi,sesuai dengan wewenangnya dantanggung jawabnya masing–masing,dalam rangka upaya mencapaitujuan organisasi bersangkutansecara legal, tidak melanggar hukumdan sesuai dengan moralmaupun etika. Pengertian lain diungkapkanoleh Mangkunegara(2001:67) dalam Mulyanto dan Dyah (2010) yang menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja secarakualitas dan kuantitas yang dicapaioleh seorang pegawai dalam melaksanakantugas sesuai dengantanggung jawab yang diberikanoleh atasan.

Kerangka Pikir /konseptual

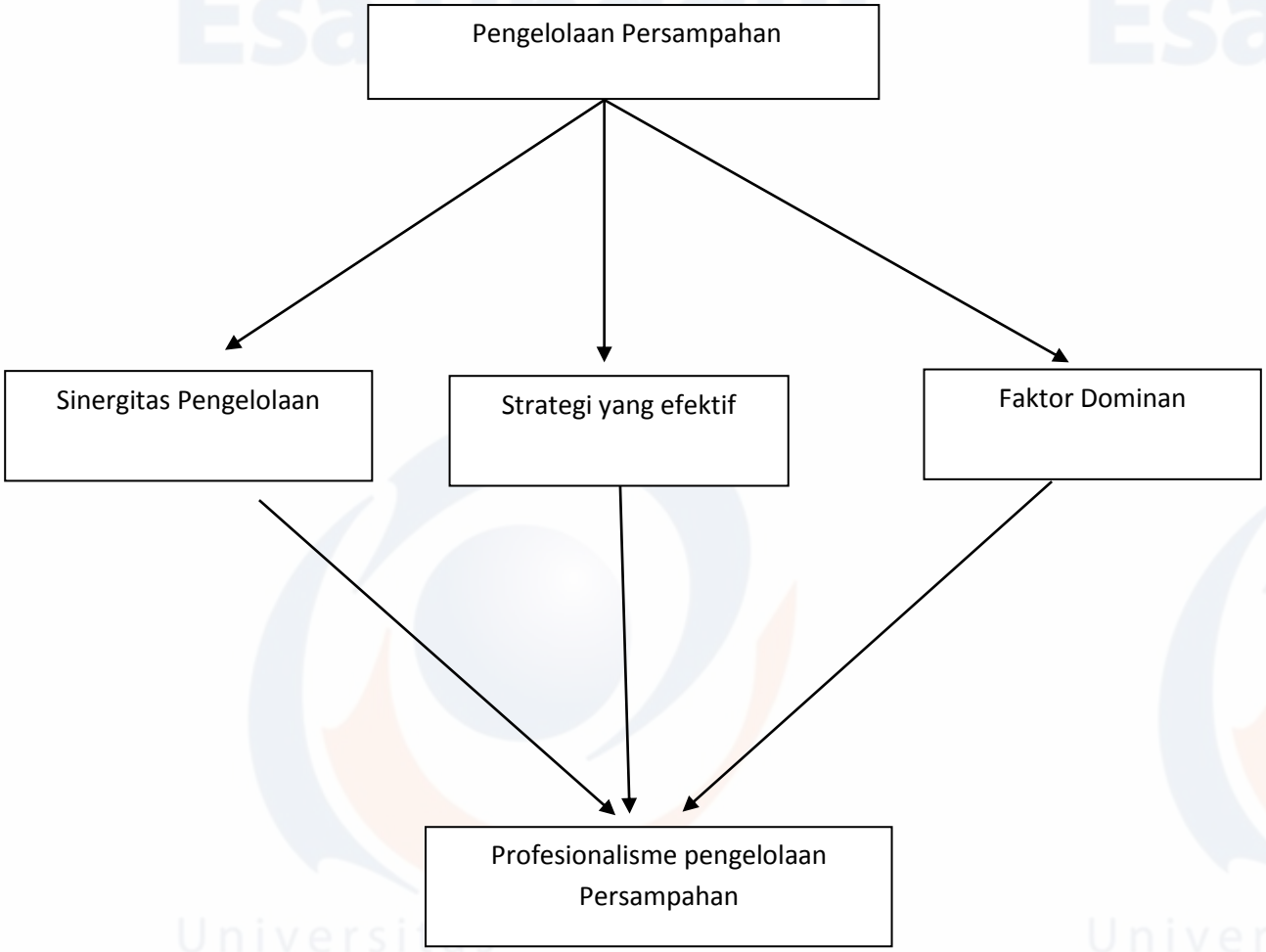

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis paradigma pengelolaan persampahan di Kota Makassar (upaya penanganan permasalahan persampahan yang berwawasan lingkungan). Berdasarkan jenis penelitiannya yang dimana menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia, pada penelitian ini dibuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Fenomenologi* untuk mengetahui penilaian atau tanggapan responden terhadap sinergitas pengelolaan persampahan terkait pelayanan kebersihan kota Makassar.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

2.3.1 Sumber Data Primer.

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data ini berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2.3.2 Sumber Data Sekunder.

Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Yang umumnya berua bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2.3.3 Fokus Masalah Penelitian

Bagaimana sinergitas pengelolaan persampahan di Kota Makassar? Bagaimana strategi yang efektif dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar, Apa faktor yang dominan dalam pengelolaan persampahan pada Makassar.

2.3.4 Instrumen Penelitian

Instrument penelitian ini merupakan peneliti sendiri, yang dimana peneliti sebagai instrumen untuk mendapatkan data yang akurat dibekali dengan bermacam-macam metode. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kepekaan dan bereaksi terhadap stimulus lingkungan, peneliti mampu menyesuaikan diri terhadap aspek keadaan dan mngumpulkan data.

2.3.5 Teknik Pengumpulan Dan Pengabsahan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Teknik Interview mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Observasi.
3. Dokumentasi.

Rencana pengujian keabsahan data. Pengabsahan data dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan.
2. Peningkatan ketekunan peneliti dalam pengamatan dan wawancara.
3. Triangulasi sumber.

2.3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Pengumpulan data (*data collection*)
2. Mereduksi data (data reduction)
3. Menyajikan data (data display)
4. Penarikan kesimpulan (drawing)

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PROFIL KOTA MAKASSAR

4.1 PROFIL KOTA MAKASSAR

Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Tanggal 31 Agustus 1971 nama Kota Makassar berubah menjadi Ujung Pandang, hal tersebut diatur berdasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971. Saat itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 Km^2menjadi 115,87 Km^2, terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten PangkajeneKupulauan.

Pada masa jabatan Presiden BJ. Habibie nama Kota Makassar dikembalikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. Dalam konsederan perubahan tersebut disebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan mendapat dukungan DPRD Tk. II dan perubahan ini sejalan dengan pasal5ayat(3)Undang-undang RepublikIndonesiaNomor22 Tahun1999, bahwa perubahan nama

daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai PeraturanDaerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassartanggal 9 Nopember 1607, hal tersebut hasil dari semuaelemenmasyarakat Kota Makassar mulai dari Budayawan, Pemerintah, danMasyarakat yang mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarahMakassar.

4.2 Letak Geografis KotaMakassar

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir Pantai Barat bagian Selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat $119^0$24'17'38 Bujur Timur dan $5^0$8'6'19 LintangSelatan.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Gowa, Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Maros, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5-10 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km^2yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 Kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai KotaMakassar.

Adapun pulau-pulau wilayah Kota Makassar merupakan bagian dari dua kecamatan yaitu kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau- pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang yang terdiri dari 12 pulau, bagian dari gugsan pulau-pulau Sangkarang. Pualu tersebut adalah Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-lumu, Pulau Bone.

Tambung, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau

Lae-lae, Pulau Gusung dan Pulau Kayangan.

Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di kota Makassar tahun 2013

No.	Kode wil.	Kecamatan	Luas wilayah (km^2)	Persentase terhadap luas kota Makassar
1	010	Mariso	1,82	1,04
2	020	Mamajang	2,25	1,28
3	030	Tamalate	20,21	11,50
4	031	Rappocini	9,23	5,25
5	040	Makassar	2,52	1,43
6	050	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	060	Wajo	1,99	1,13
8	070	Bontoala	2,10	1,19
9	080	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	090	Tallo	5,83	3,32
11	100	Panakukkang	17,5	9,70
12	101	Manggala	24,14	13,73
13	110	Biringkanaya	48,22	27,43
14	111	Tamalanrea	31,84	18,12
15	7371	Kota Makassar	175,77	100,00

Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2014

Berdasarkan table 4.1 di atas Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di kota Makassar pada

tahun 2013 menunjukkan bahwa kecamatan biringkanaya adalah kecamatan terluas di kota Makassar dengan luas 48,22 km^2 dan persentase terhadap luas kota Makassar yaitu 27,49%. Sedangkan kecamatan wajo adalah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 1,99 km^2 dan persentase terhadap luas kota Makassar yaitu 1,13%.

4.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 20013 tercatat sebesar 1.408.027 jiwa yang terdiri dari 696.086l aki-laki dan 671.986 perempuan.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar dimungkinkan akibat terjadinya arus urbanisasi karena faktor ekonomi, pendidikan, dan juga Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan Sulawesi Selatan serta pusat perdagangan di Kawasan Indonesia Timur.

Penduduk Kota Makassar yang berjumlah 1.408.027 jiwa tersebar di14 Kecamatan. Namun persebaran tersebut tidak merata, hal tersebut disebabkan konsentrasi penduduk berbeda pada tiap kecamatan, serta kebijakan pemerintah tentang penetapan lokasi pembangunan rumah pemukiman penduduk dan lokasi pengembangan kawasan indiustri juga berbeda.

Penyebaran penduduk kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di wilayah kecamatan biringkanaya, yaitu sebanyak 195.906 atau sekitar 13,91 persen dari total penduduk, disusul kecamatan tamalate sebanyak 182.939 jiwa (12,99 persen), kecamatan rappocini sebanyak 156.665jiwa (11,13 persen), dan yang terkecil adalah kecamatanwajo sebanyak26.477 jiwa (1,88 persen).

4.4 Visi Kota Makassar

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan

diwujudkan pada periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang dijelaskan dan dijabarkan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota Makassar 2025 dan visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018.

Visi Kota Makassar 2025 adalah **"Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat".** Visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018 adalah **"Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018".** Terhadap visi Kota Makassar 2005- 2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang relevan dengan isu strategis KotaMakassar.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019adalah:

"Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua"

Visi Pemerintah Kota Makassar 2019 ini memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2025, khususnya dengan penekanan visi RPJPD pada orientasi global, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai kota dunia, serta penekanan berwawasan lingkungan dan paling bersahabat pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan sebagai yang nyaman untuk semua. Pokok visi kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasall pada visi RPJPD, dalam visi RPJMD 2013- 2018 ditempatkan sebagai bagian dari substansi kota dunia. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak

pada posisi Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua‖ yang merupakan bagian penting dari terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018‖.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagaiberikut.

Kota Dunia**,** dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya —masyarakat sejahtera standar dunia‖.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagaiterwujudnya -kotanyamankelasdunia‖.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakaan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok difabel). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi.

4.5 Misi Kota Makassar

Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Misi selanjutkan diturunkan dalam Rencana Pembangaunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).

Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

***Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera* Standar Dunia**

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga dan disabilitas, (3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8) pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi ―masyarakat sejahtera standardunia‖.

Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berkelas Dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota,

(3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi ―kota nyaman kelas dunia‖.

***Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Kelas* Dunia Bebas Korupsi**

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal (1) peningkatan pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat

RT/RW,(3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsungkerumah, (5) pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi —pelayan publik kelas dunia bebas korupsi.

4.6 Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea memiliki luas wilayah 31,84km^2 dengan jumlah penduduk 89.143 jiwa. Tpografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan elevansi 1-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga Gedung pendidikan.

Salah satunya adalah Universitas Hasanuddin sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memilikitambak.

Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai berbatasan langsung dengan laut dan bagian muara Tallo. Sebagain besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai yang cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan ParangLoe).

Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil sepanjang sekitar 20m di Lantebung (Kelurahan Bira). Potensi sumberdaya alam yang masih dapat ditemukan di kacamatan ini adalah tambak. Secara keseluruhan lahan tambak di Kecamatan Tamalanrea yaitu 588 ha, dengan

produksi perikanan darat (tambak) yaitu 190,10ton.

4.7 Kacamatan Manggala

Kacamatan manggala memiliki luas wilayah 24,14 km^2 atau sekitar 13,73 % dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km^2. Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga tinggi, dengan elevasi 2-22m diatas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibanding kacamatan lainnya yaitu 827ha dan 411ha dengan potensi produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki potensi kecil. Tahun 2008 produksi hanya sekitar 59,10 ton atau senilai 1.156.200rupiah.

Meskipun di sub sektor perikanan kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dengan jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak bear (sapi dan kerbau)1352 ekor sedangkan untuk ternak kecil (kambing) 1.016ekor.

4.8 Kecamatan Wajo

Kacamatan Wajo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainnya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km Atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 35.011 jiwa dengan kepadatan 17.593 jiwa/km^2. Secara topologi kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pergeseran dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai.

BAB V

PEMBAHASAN

Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah. Lebih khusus pemeritah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan menyelenggarakan pengelolaan sampah skalakabupaten/kota.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tak luput dari permasalahn persampahan. Jumlah penduduk yang begitu besar menghasilakan timbulan sampah yang besar pula. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini tentu merupakan masalah cukup besar yang dimiliki oleh pemerintah kota Makassar.

Dalam menciptakan kota bersih dan bebas dari masalah persampahan, saat ini telah mengenal istilah Lihat Sampah Ambil (LISA) dan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR) yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih. Berfokus

pada Program Makassar Ta tidak rantasa. Studi ini menjelaskan tentang pelaksanaan program Makassar Ta Tidak Rantasa sebagai salah satu kajian dalam menjelaskan konsep pelaksanaan kebijakan walikota Makassar.

Gerakan Makassar Ta tidak rantasa adalah salah satu program pemerintah kota makassar dalam mewujudkan makassar yang bersih dan sehat. Gerakan yang dicanangkan pada 15 juni 2014 diperkenalkan pada warga Kota Makassar pada acara A'bbulo Sibatang Lompoayang digelar di Celebes Convention Centre (CCC) Jalan Metro Tanjung Bunga (Ujung pandang ekspres terbit 16 juni 2014). Program ini diharapkan agar masyarakat dapat mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa dukungan masyarakat maka Program Makassar Ta Tidak Rantasa tidak dapat berjalan dengan baik.

Setelah sembilan bulan berjalannya program ini, tampaknya kondisi Kota Makassar masih belum banyak berubah dari sisi kebersihan. Masih banyak ditemui sampah yang berserakan dan juga tumpukan sampah di pinggir jalan. Belum lagi masih kurangnya kesadaran masyarakan akan kebersihan lingkungan.

Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia dimana masyarakatnya telah menyadari akan pentingnya kebersihan. Seperti kota Bandung yang pada tahun 2006 dikenal dengan Bandung Lautan sampah, akan tetapi saat ini kebersihan di Kota Bandung telah meningkat. Kota Bandung telah menjalankan Perda No 11 tahun 2005 dalam penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan). Walikota Bandung sejak tanggal 1 Desembar 2014 telah menegaskan akan memberikan denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu Walikota Bandung juga membuat Perwali Nomor 522 tahun 2007 yang mengatur tatacara pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyelenggaraan K3. Walikota Bandung juga membentuk relawan

denda buang sampah atau Prabu, yaitu pahlawan urang Bandung. Selain Kota Bandung, Kota Surabaya juga memiliki hal cara yang baik dalam mengatasi kebersihan kebersihan lingkungan, dengan malaksanakan program reduce, reuse dan recycle (3R) Kota Surabaya telah berhasil menjadi kota yang bebas dari masalahpersampahan.

Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan Program Gemar Makassar tidak rantasa (MTR) telah membuat instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas kebersihan agar melaksanakan program yang mendukung MTR. Khusus untuk lurah, mensosialisasikan Gemar MTR kepada masyarakat dari rumah ke rumah (door to door) melalui brosur-brosur. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum tahu yang dimaksud dengan Gemar MTR dan bagaimana Konsep pelaksanaannya sehingga belum berdampak terhadap perubahan pola pikirmasyarakat.

Melihat kondisi di atas maka wajar jika sampai saat ini program Makassar Ta Tidak Rantasa tidak terelisiasi dengan baik. Kekuatan dalam menjalankan Gemar MTR juga belum ada, baik Perda maupun Perwali yang membahas pengolahan sampah secara khusus di Kota Makassar. Dari hal tersebut dapat dipertanyakan kesiapan pemerintah terutama aparatur pemerintah akan kesiapannya dalam menjalankan Makassar Ta Tidak Rantasa. Berbeda halnya dengan Kota lain yang dalam menjaga kebersihan memiliki perda yang mengatur hal tersebut dan Perwali yang juga mendukung Program dalam menghadapi masalah persampahan tersebut.

Dalam pandangan lain, keberadaan sebuah program sebagai instruman pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dapat dilihat dari tinjauan manajemen stratejik bahwa program merupakan turunan yang berkesinambuanagn dari visi dan

misi pemerintah daerah dimana hal tersebut memiliki tujuan sasaran sertakebijakan-kebijakanyang didesain sedemikianrupa sehingga melahirkan program dan kegiatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari kesinambungann instruman-instrumaen diatas.

Keberadaan program Makassar Ta Tidak Rantasa yang tidak memiliki dasar kebijakan yang tidak jelas dikhawatirkan tidak akan terealisasi dengan maksimal dikarenakan ada proses yang tidak berkesinambungan dalam perumusan program yang secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak terhadap pelaksanaan program sebab rantai-rantai proses ini akan membawa visi pada kegiatan nyata dan panduan oprasional lapangan untuk aparatpemerintah.

1. Kecamatan Tamalanrea (Sebagai KawasanPendidikan)
2. Kecamatan Manggala (Sebagai Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah KotaMakassar)
3. Kecamatan Wajo (Sebagai Kawasan Perdagangan dan Wilayah Lokalisasi)
4. Makassar Ta TidakRantasa

Makassar Ta Tidak Rantasa yang dimaksud adalah program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah kebersihan lingkungan (persampahan) di Kota Makassar. Program ini menjadikan kecamatan sebagai sebagai dinas yang secara langsung menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dalam rangka menjadikan setiap daerahnya bersih.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar. Dengan demikian secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kecamatan memiliki hak otonom dalam menjalankan setiap kegiatan

di wilayahnya masing-masing untuk menyukseskan programini.

5.1 Sampah Di Kota Makassar

5.1.1 TimbulanSampah

Pada tahun 2014 timbulan sampah di Kota Makassar mencapai 4.301,18 m^3 dan yang teratasi hanya sebesar 3.881,25 m^3.

Tabel 4.2 : DATA TIMBULAN SAMPAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014

NO	NAMA KECAMATAN	TIMBULAN SAMPAH	TIMBULAN TERTANGANI
1	Mariso	187,36	169,09
2	Mamajang	207.17	186,95
3	Tamalate	522.09	471,12
4	Rapocini	490.40	442,52
5	Makassar	284.40	256,64
6	Ujung Pandang	98.24	88,65
7	Wajo	129.50	108,38
8	Bontoala	252.50	192,00
9	Ujung Tanah	250.50	149,76
10	Tallo	276.00	418,87
11	Panakukkang	462.00	416,45
12	Manggala	345.00	306,52
13	Biringkanayya	485.00	398,45
14	Tamalanrea	310.52	275,87
		4.301,18	**3.881,25**

Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

Dengan melihat data di atas maka terlihat bahwa sebanyak 419,93 m^3 sampah yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota

Makassar. Hal tersebut merupakan masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh Kota Makassar.

5.1.2 Teknis Pembuangan Sampah

Dinas Pertamanan dan Kebersihan merupakan SKPD yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah di rumah tangga untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pada periode sebelumnya pengangkutan sampah dilakukan dan dikorniasi langsung oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, akan tetapi padan periode ini masalah pengangkutan sampah dilimpahkan langsung ke kecamatan agar saat terjadi masalah atau keluhan dari masyarakat dapat langsung dilaporkan ke kelurahan atau kecamatan, sehingga alur pelaporan dan penindaklanjutan dapat lebih cepat. Dalam wawancara dengan Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat menyebutkan :

Ada dua model pelayan dalam masalah persampahan ini. Jadi dari dua itu ada yang dilimpahkan ke kecamatan dan ada yang ditangani di sini. Yang ditangani Dinas Kebersihan adalah pelayanan sampah dari kontainer untuk dibawa ke TPA. Jadi untuk pengangkutan kerumah-rumah itu di kecamatan mulai dari jadwal pengambilan, mobil apa yang beroprasi itu diatur oleh kecamatan‖ (Hasil wawancara 2 september2015)

Di setiap kecamatan telah disediakan truk kontainer Tangkasaki dan motor fukuda untuk melakukan pengkangkutan di rumah-rumah dan lorong-lorong. Di setiap kecamatan telah dibuatkan jadwal pembuangan sampah yaitu pukul 18.00-20.00 WITA dan pengangkutan dilakukan 20.00 WITA. Jadwal tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat agar membuang sampahnya sesaui jadawal yang telah ditetapkan

oleh kecamatan.

Untuk daerah kecamatan Tamalanrea pengangkutan sampah dilakukan 3 kali dalam sehari. Untuk pengangkutan kerumah-rumah itu dilakukan 2 kali dalam sehari.

Pembahasan di atas menunjukkan adanya perbedaan mekanisme pengangkutan dan pembuangan sampah di tiap-tiap kecamatan. Hal ini merupakan kebijakan yang diambil dari setiap kecamatan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam melalukan peningkatan manajemen persampahan, saat ini di kota makassar telah dibuat terminal sampah di setiap kecamatan. Terminal sampah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sementara dan disitu nantinya juga masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah setelah itu dibawa langsung keTPA.

5.1.3 Konsep Pelaksanaan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa

Bedasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelolah sampah di daerah masing-masing. Dalam pasal 5 Undang-undang Pengelolaan sampah menyebutkan bahwa:

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah termuat pada Bagian Ke empat Pasal 9 yang berbunyi:

1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional danprovinsi, Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihaklain;

c. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup

e. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengankewenangannya.

2. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturanmenteri.

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar membuat Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa sebagai strategi dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Makassar. Inilah salah satu

inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi permasalah sampah yang kian tak terkendali.

Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa dibuat karena melihat kondisi lingkungan Kota Makassar yang kotor dan masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan, adanya fenomen masyarakat yang suka membung sampah di sembarang tempat diwaktu sembarang, dan volume sampah di Kota Makassar juga terus meningkat.

Dari hal diatasa maka muncullah pemikiran untuk menciptakan sebuah program yang dapat mengatasi hal tersebut dan dibutuhkan sebuah gerakan yang dapat menyadarkan masyarakat Kota Makassar untuk selalu menjaga kebersihan. Maka dari itu Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa Merupakan program yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah dan kebersihan di Makassar serta dalam rangka menyadarkan masyarakat akan cinta kebersihan Desain Pelaksanaan Gerakan Makassar Ta tidakRantasa

Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh walikota dan wakil walikota makassar sebagai ruang, tempat dan wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kota Makassar lebih baik dan lebih maju.

Pengertian Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya masalah sampah akan tetapi dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kota Makassar harus berprilaku bersih.

Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa (Gemar MTR) merupakan program pencanagan cinta akan kebersihan. Gerakan Makassar Tidak Rantasa ini merupakan gerakan moral yang diharapkan dapat merekonstruksi pemikiran rakyat akan kebersihan dan pola hidup sehat. Hal ini dilakukan karena

pemerintah Kota Makassar sadar bahwa untuk mengatasi permasalah sampah dibutuhkan program yang khusus untuk menanganinya. maka dari itu dibentuklah program Gemar MTR yang menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam menjadikan lingkungan Kota Makassar bersih dan terbebas dari masalah persampahan. Hal ini dilakukan dengan merubah pola pikir masyarakat tentang sampah dan lingkungan bersih/ tidakrantasa.

Program ini diharapkan bisa merubah pola pikir masyarakat yang dulunya sering membuang sampah sembarang tempat dapat berubah menjadi hidup bersih dan lingkungan Kota dapat terbebas dari masalah persampahan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan tentang desain pelaksanan Program Gerakan Makssar Ta tidak Rantasa dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu Jargon, Kegiatan dan Pelibatan ElemenPendukung. Ketiga pendekatan inilah yang dinilai oleh penulis sebagai cara untuk mencapai tujuan dari Gemar MTR.

Dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa, Pemerintah Kota juga menggunakan jargon yang dapat membantu tercapainya Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa. Jargon yang digunakan adalah LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku TidakRantasa.

LISA merupakan singkatan dari Lihat Sampah Ambil. Jargon ini banyak dijumpai di spanduk-spanduk, dinding sekolah-sekolah dan dinding-dinding lorong Kota Makassar. Jargon ini bertujuan untuk merubah prilaku masyarakat agar setiap kali melihat sampah di sekitar mereka agar segera memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. LISA merupakan jargon yang mendukung program Gemar MTR dalam menjaga kebersihan lingkungan, dalam menjaga itu dibutuhkan semua elemen yang ada di Kota Makassar baik itu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Jargon ini juga didukung dengan program pengadaan tempat sampah gendang dua. Diharapkan masyarakat saat melihat sampah agar memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah gendang dua yang telah disediakan oleh pemerintah kota makassar.

1. MABELO yang merupakan singkatan dari Makassar Bersih Lorong. MABELO juga merupakan jargon yang mendukung Gemar MTR yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat Kota Makassar utamanya yang tinggal di lorong-lorong Kota Makassar agar selalu membersihkan halaman rumah dan membersihkan lorong sekitar tempattinggalnya.
2. Makassar Bebas Samapah atau yang disingkat MABASA merupakan jargon yang biasa kita jumpai di pojok-pojok jalan Kota Makassar. Jargon ini ditujuan agar masyarakat Makassar tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Jargon inilah yang mendukung program Gemar MTR dalam mengatasi masalah persampahan dan merubah prilaku masyarakat agar tidak membuang sampah disembarang tempat.
3. Aku dan Sekolahku tidak rantasa, merupakan jargon yang berada di sekolah-sekolah agar selalu hidup bersih dan tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Pemerintah kota menyadari bahwa salah satu tempat yang paling efektif dalam membudayakan hidup bersih adalah di sekolah baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Para guru sejatinya mendidik siswanya agar memlihara kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dalam menjaga kebersihan itu diawali dengan usia dini dan pendidikan dini. Maka dariitu Sekolah merupakan tempat yang paling efektif dalam menanamkan pentingnya hidup bersih dan sehat. Sebagaimana hasil

5.1.4 Kegiatan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa

Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa memiliki tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak rantasa dalam kehidupan sehari-hari dan selalu hidup bersih. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah telah membuat kegiatan baik ditingkat Kota Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. Kegiatan yang dilakukan adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, dan Sosialisasi Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (GEMAR MTR), Sampah Tukar Beras.

1. Lorong Garden (LONGGAR)

   Program Longgar ini merupakan program yang memanfaatkan lorong-lorong kota agar lebih produktif. Lorong yang ada ditata agar lebih indah, bersih dan hijau dengan tanaman sayur, tomat, cabai dan lainnya. Masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman yang dapat bernilai ekonomis atau dapat dikonsumsi sehari-hari. Untuk menunjang program tersebut, pemerintah berupaya membut Badan Usaha Lorong yang nantinya tanaman hasil dari lorong garden tersebut dapat dijual di badan usaha tersebut. Dengan program inimakadiharapkan lorong-lorong yang ada menjadi lebih produktif, bersih dan tertata indah.

2. Kerja Bakti

   Dalam mencapai tujuan perubahan pola pikir masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat, maka pemerintah Kota Makakassar membuat jadwal kerja bakti yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat membersihkan lingkungan kerja, rumah dan lingkungann sekitarnya. Dalam pelaksaan kerja bakti tersebut diharapkan agar segala elemen kota makassar dapat berperan aktif baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Secara konseptual,

pelaksaan kerja bakti tersebut dibagi menjadi 3 hari yaitu jumat bersih, sabtu bersih dan minggu bersih. Semua elemen wajib berperan aktif dalam pelaksanaan kerja bakti tersebut baik pemerintah, karyawan swasta maupun masyarakat membersihkan di lingkungansekitar.

Yang pertama jumat bersih itu ditujukan untuk pegawai pemerintahan maupun karyawan swasta mengadakan kerja bakti di wilayah tempat berkerja masing-masing, sabtu bersih ditujukan kepada sekolah-sekolah baik murid, dan guru untuk membersihkan sekolah masing-masing. Selanjutnya untuk minggu bersih ditujukan kepada semua masyarakat baik yang berstatus pegawai atau karyawan swasta saat berada di rumah dia kembali menjadi masyarakat dan wajib untuk turun kerja bakti membersihkan lingkungan rumah atau Lorong lorong rumah.

3. Sosialisasi Gemar MTR

   Gerakan Makassar Ta tidak rantasa yang telah di canangkan oleh pemerintah Kota Makassar tentu harus disosialisasikan. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengenal dan memahami apa yang dimaksud dengan Makassar Ta Tidak Rantasa dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

   Sosialisai Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan tanggung jawab kelurahan. Bentuk sosialisasi kelurahan itu dilakukan dari rumah ke rumah dengan membagikanbrosur-brosur.

4. Gerakan Sampah TukarBeras

   Dalam rangka penanaman budaya bersih di masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah dikota makassar, maka gerakan sampah tukar beras

merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut.

Gerakan ini dilakukan dalam meningkatkan manajemen persampahan dan mengubah prilaku masyarakat yang suka membauang sampah sembarangan. Program ini selaras dengan program 3R (*reduce, reuse* dan *recycle)* yang dimana masyarakat dapat memilah sampah organik dan anorganik. Setelah itu, sampah anorganik tersebut dapat dia kumpulkan dan ditukar di bank sampah dan menjadi tabungan bagi masyarakat yang menukarkan sampahanya tersebut. Dengan demikin sampah yang ada akan bernilai ekonomi bagi masyarakat. Setalah sampah ditukar di bank sampah maka tugas pemerintah untuk mengolah sampah-sampah anorganik tersebut baik dengan membangun pengolahan sampah anorganik sendiri maupun bekerja sama dengan perusahaan swasta yang siap bermitra denganpemerintah.

Dengan adanya program Gerakan Sampah Tukar beras ini maka masyarakat akan kurang membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat malah akan memilah kembali sampah-sampah yang bernilai ekonomi tersebut. Inilah salah satu cara merubah pola pikir masyarakat yang dulunya melihat sampah sebagai suatu masalah berubah menjadi sampah adalah hal yang benilai ekonomi dan juga prilaku hidup tidak rantasa itu pasti tercapai.

5.1.5 Pelibatan Elemen Pendukung

Dalam desain Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa keterlibatan elemen-elemen pendukung merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya. Adapun elemen pendukung dari Gemar MTR antara lain Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat / Kepemudaan dan masyarakat itu sendiri.

Untuk menyukseskan Gemar MTR maka diperlukan hubungan kerja sama antar elemen baik pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dan masyarakat maupun masyarakat dengan ormas.

Kerja sama antar elemen pendukung sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan Gemar MTR. Secara konseptual penulis mencoba menjelaskan hubungan kerja sama yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Kerja sama warga dan pemerintah merupakan hal yang paling berperan dalam menyukseskan Gemar MTR. Untuk mewujudkan itu maka secara konseptual terdapat forum untuk mewadahi kerja sama tersebut forum tersebut disebut FORKASIH merupakan Forum Kampung Bersih yang merupakan inisiator ataupun pengawas pelaksanaan kegiatan MTR di wilayah kampung masing-masing agar terciptanya kampung bersih. FORKASI merupakan garda terdepan di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Gemar MTR. Forum ini merupakan forum kerja sama antar Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan program GemarMTR.
2. Hubungan kerja sama antar pemerintah juga merupakan hal yang tak kalah penting dalam menyukseskan Gemar MTR. Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Setiap SKPD di Kota Makassar memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan. Pembagian wilayah kerja ini dibuat agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Pembagian wilayah kerja ini

dimaksudkan untuk melakukan pembinaan kepada wilayah kerjadanmelakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah pola pikir tentang sampah sekaligus sebagai pendampingan terhadap pelaksanaan 3R.

3. Organisasi Masyarakat juga memiliki andil dalam pelaksanaan program Gemar MTR. Ormas dalam hal ini memiliki peran dalam membuat kegiatan-kegiatan pendukung MTR seperti kerja bakti, penataan lorong dan sosialisasi Gemar MTR itu sendiri. Beberapa ormas yang berparan dalam pelaksanan MTR seperti KNPI, Brigadir 08 Kota Makassar, Purna Praja IPDN, Mapala se-Kota Makassar dan lainsebagainya.

4. Kerja sama Swasta adalah hal yang tak dapat dilupakan. Diamana swasta merupakan salah satu elemen dalam menyukseskan segala kebijakan maupun program-program pemerintah. Demikian pula dengan Gemar MTR swasta juga berperan dalam menyukseskan MTR ini. Pada periode ini, terdapat program Sampah Tukar Beras dimana program ini mendapat bantuan dari pihak swasta dalam pengolahan maupun penjualan sampah anorganik yang telah dikumpulkan di banksampah.

5.1.6 Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa

Kebijakan merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalah yang dihadapi oleh suatu daerah yang disesuiakandengan kondisi lingkungan. Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Kebijakan tentang program Makssar Ta Tidak Rantasa. kebijakan ini sesuai dengan pendekatan Dunn (1981) yang menyebutkankebijakan sebagai bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan

tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki.

Pelaksanaan program Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan program yang ditujukan untuk merubah pola pikir masyarakat dan juga sebagai salah satu cara dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen persampahan.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanan Program Gemar MTR ini maka penulis menggunakan teori Richard M. Steers dengan melihat 3 indikator dalam mengukur efektivitas pelaksaannya. Indikator tersebut yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu indicator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, baik itu kebersihan lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah. Masalah kebersihan tidak kunjung selesai hampir di setiap kota di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Kondisi perkotaan yang masih jauh dari predikat kota bersih masih menjadi info yang populer diangkat oleh banyak media setiap harinya. Ketika sampah masih banyak berserakan dimana-mana kerap dianggap tidak sesuai dengan visi Kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu kebersihan, keindahan dan kerapihan seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik

sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Masyarakat kita semakin maju dan berkembang, kebutuhan sehari-seharinya pun semakin bertambah. Setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah, di rumah, di perkantoran, di pabrik-pabrik, di pasar bahkan di jalanan sekalipun, di mana-mana selalu ada produk barang atau makanan yang habis masa ekonomisnya sehingga di anggap sudah tidak diperlukan lagi dan dibuang menjadi sampah. Sampah yang produksinya manusia banyak menimbulkan masalah.

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat yang beragam. Perilaku masyarakat perkotaan yang relatif berbeda dalam menyikapi masalah kebersihan erat relevansinya dengan pendidikan atau pengetahuan tentang kesehatan yang tidak merata. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan dalam waktu yang lama tanpa adanya aturan atau sanksi yang bisa membuat jera. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan buang sampah bukan pada tempatnya membuat kondisi Kota menjadi memprihatinkan baik dari segi kebersihan, keindahan dan kerapihanbegitupun dengan kesehatan masyarakat pada umumny

5.1.7 Timbulan Sampah Perkotaan di Kota Makassar

Kota Makassar sedang merangkak menjadi kota modern-metropolis di antara jargon-jargon “Water front City”, “Great Expectation”, “Save Our City”, “Makassar untuk Semua”, “Kota

Dunia 2025", dan semacamnya. Jargon-jargon itu sesungguhnya mempertegas bahwa kota Makassar adalah wilayah yang menarik siapa saja untuk datang mengadu keberuntungan. Investor dan kaum urban bertarung di dalam ruang kota yang luasnya hanya 175,77 km. Kenyataan kota yang semakin modern membawa implikasi langsung pada produksi sampah (limbah).

Manusia setiap harinya menghasilkan sampah baik itu sampah organic maupun sampah anorganik. Seiring dengan berkembangnya kota Makassar maka perkembangan penduduk Kota Makassar pun akan semakin meningkat, hal tersebut tentu saja meningkatkan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Makassar. Persoalan pengelolaan sampah menjadi rumit, serumit dinamika sosial penduduknya. Akar persoalannya menjadi sistemik, di antara perilku warga, aparat birokrasi, manajemen dan kebijakan pengelolaan sampah. Penumpukan sampah mulai dari selokan, kanal, di TPS sampai ke TPA.

5.1.8 Perubahan Gaya Hidup + Sampah

Globalisasi dan kapitalisasi kota adalah idiologi besar yang dipraktekkan umumnya kelompok menengah dan elit sosial-ekonomi kota. Pandangan hidup elit kota yang justru berpengaruh kuat sekali membentuk ikon kota saat ini. Pasar-pasar modern, produk makanan kemasan dan siap saji, hotel, tempat hiburan, dan kebebasan beriklan di mana saja yang dikuasai elit pemodal besar, telah membentuk gaya hidup orang kota.

Orientasi nilai yang membentuk gaya hidup orang kota adalah "cepat jadi, cepat saji, cepat habis". Muncul persoalan baru ketika produk kemasan plastik, kaleng, botol mendominasi jenis sampah perkotaan. Bahan kandungan plastik dipakai pada

hampir semua produk konsumtif orang kota, dari produk elektronik, kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, peralatan belajar, hingga kemasan makanan dan minuman.

Budaya konsumsi yang serba instan dan boros energi saat ini adalah ciri utama kemajuan ”orang kota”. Siklus hidup konsumtifisme itu berujung pada buangan sampah. Celakanya, jenis sampah yang dibuang konsumen kota itu umumnya adalah sampah an-organik, contohnya plastik. Di Indonesia, khususnya di Makassar sampah paling bermasalah adalah plastik. Kebanyakan sampah berbahan plastik menumpuk, menyebar, memampetkan selokan, bahkan mengotori sungai dan pesisir kota.

5.1.9 Timbulan sampah dan Status Kesehatan Masyarakat

Manusia setiap harinya menghasilkan sampah baik itu sampah organic maupun sampah anorganik, sampah juga dapat mengakibatkan terjadinya letusan wabah penyakit, untuk di Kota Makassar sampah adalah masalah yang cukup kompleks dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesehatan (Abses dari pintu masuknya penyakit berbasis sampah).

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti yang meneliti tentang sampah kejadia penyakit berbasis sampah di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Akibat pencemaran yang diakibatkan sampah : 65 %
2. Vector dari sampah : 45 %
3. Pembuangan Limbah Industri dan TTU Kota Makassar

Berdasarkan hasil pemantauan sementara pembuangan limbah industry dan TTU dari beberapa titik pemantauan dapat dilihat tidak memenuhi syarat dan dapat menyebabkan adanya

pencemaran lingkungan, yang akan berdampak negative pada kelangsungan keseimbangan ekologis

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat Kota Makassar

   Sampah yang menjadi permasalahan di kota Makassar dapat diatasi dengan sikap dan tindakan yang bersahabat dengan sampah, diantaranya partisipasi masyarakat, turut sertanya pihak kelembagaan (swasta) dan pemerintah agar permasalahan persampahan dapat teratasi secara menyeluruh. Namun di kota Makassar minimnya partisipasi masyarakat yang ada sehinnga membuat masalah persampahan tak kunjung selesai.

   Sosialisasi seringkali tidak dibarengi dengan penyediaan P/S yang memadai (contoh: sosialisasi memilah sampah, namun tidak disediakan wadah, gerobak, truk, dll yang mendukung kegiatan tsb)

5. Peraturan

   Lemahnya peraturan dilihat dari belum jelasnya sanksi yang dikenakan kepada pelaku pembuang sampah sembarang. Selain itu juga Pelaksanaan Perda belum optimal contohnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011.

5.2 KENDALA

5.2.1 Partisipasi Warga

a) Adanya persepsi/anggapan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab pemerintah kota, sehingga mengurangi tanggungjawab diri untuk memelihara kebersihan.

b) Peran serta masyarakat kurang terarah dan hanya bersifat insidentil, misalnya dalam rangka peringatan atau perayaan tertentu, kedatangan tamu agung, atau instruksi atasan.

c) Partisipasi warga dalam pengelolaan sampah tidak ditunjang oleh program dan anggaran yang memadai dari dinas kebersihan dan lingkungan hidup. Alokasi anggaran yang ada menceminkan rendahnya komitmen pemkot dalam mendorong keterlibatan warga dalam pemecahan masalah sampah.

d) Belum ada unit khusus dari pengelola kebersihan kota yang bertanggung-jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, motivasi peranserta warga, dan mengembangkan model alternatif pengolahan sampah yang bermanfaat secara sosial, ekonomis dan ramah lingkungan.

5.2.2 Kinerja Pelayanan Pemerintah

1. Manajemen Pengangkutan
   a. Keterbatasan sarana penampungan sampah dalam pemukiman membuat warga terbiasa membuang sampahnya di sembarang tempat atau di tanah kosong milik perorangan. Ironisnya lagi, tidak banyak warga yang menyediakan tanahnya untuk TPS.
   b. Petugas armada pengangkut sampah lambat mengangkat sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara (bak, kontainer maupun tanah kosong). Akibatnya sampah meluber ke jalan dan menyumbat selokan.
2. Teknologi Pengolah Sampah Sangat terbatas penggunaan teknologi pengolah sampah untuk tujuan sosial maupun komersial. Padahal sekitar 70% sampah di Makassar adalah sampah organik, yang potensial diolah menjadi

pupuk kompos. Sedangkan sampah an-organik membutuhkan teknologi pendaur-ulang untuk mengurangi volumenya. Para pemulung sebenarnya memerlukan mesin pencacah plastik untuk meningkatkan harga jualnya.

3. Kinerja Pelayanan
   a. Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah sampah yang dapat ditangani.
   b. Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep dan peruntukan retribusi sampah
   c. Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerja sama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerja sama lainnya.

5.2.3 Investasi dan Teknologi

a) Langkanya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nirlimbah.
b) Terbatasnya jumlah industri yang memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang
c) Rendahnya kepedulian Pelaku Usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan.

Kebijakan penanggulangan kebersihan yang dilaksanakan selama ini seperti melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan manfaatnya terhadap kesehatan sebagai langkah antisipatif agar timbulnya penyakit dapat dihindari serta dapat memberikan manfaat terhadap keindahan kota. Namun hal tersebut sepertinya belum maksimal dikarenakan masih banyaknya sampah yang sering dijumpai disekitar kita. Hal tersebut terjadi disebabkan karena

masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat.

Perilaku sebagian masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembiaran terhadap pola hidup tidak bersih menjadikan mereka tidak merespon kebijakan-kebijakan terkait dengan kebersihan atau kesehatan yang sudah ada.

Alternatif kebijakan yang kami tawarkan adalah kebijakan tentang pentingnya memelihara kebersihan disertai dengan adanya efek jera kepada masyarakat yang biasanya tidak disiplin untuk lebih sadar dalam penerapan pola hidup sehat.

Apabila ada masyarakat yang kedapatan membuang sampah disembarang tempat akan dikenakan denda hingga Rp. 5.000.000,- baik mereka ditemukan oleh pemerintah (Dinas terkait) ataupun masyarakat biasa. Orang yang menemukan dan melaporkan hal tersebut kepada petugas akan mendapatkan reward berupa uang sebesar seperdua dari total jumlah denda terlapor dan perlindungan dari pemerintah.

Pemberlakuan kebijakan yang demikian dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk mengubah perilaku yang sebelumnya terbiasa dengan pola hidup tidak bersih. Sehingga ekspektasi dari pemberlakuan penambahan kebijakan tersebut dapat memicu terciptannya tatanan Kota Makassar yang indah, rapih, sehat dan jauh dari sumber penyakit.

Tetapi dengan belum meratanya proses sosialisasi Gerakan Lihat Sampah Ambil kepada masyarakat di Kota Makassar, sehingganya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan tersebut. Ada beberapa orang yang kami sengaja wawancarai untuk menanyakan apa

itu LISA , dari 20 orang yang di wawancarai sekitar 7 orang saja yang mengetahui tentang arti dari LISA tersebut

Dewasa ini kita sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan seputar lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dan berimplikasi terhadap pola dan corak kehidupan masyarakat modern pada saat ini. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang acap kali menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah mengenai kurang optimalnya pemerintah beserta stakeholder lainya dalam mengimplementasikan setiap kebijakan dan strategi terkait dengan pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan di negeri ini. Paradigma yang terealisir saat ini terkait penanganan sampah masih sebatas pada penanganan yang konvensional yaitu sampah ditaruh ditempat terbuka untuk dibiarkan membusuk dengan sendirinya. Walaupun sudah diusahakan bahwa tempat pembuangan ini disentralisasi disatu kawasan tertentu dengan metode sanitary landfill. Namun kenyataannya permasalahan sampah masih tidak kunjung selesai, sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya, dan polusi air yang dikarenakan penanganan air lindinya (leacheate) kurang bagus sehingga meresap ke berbagai tempat yang tidak seharusnya, serta menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit dan juga sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir. Inilah salah satu bentuk masalah yang ditimbulkan apabila penanganannya tarlambat dan tidak sistematis.

UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah jelas mengamanatkan kepada pemerintah beserta pihak-pihak terkait lainnya untuk proaktif dan lebih responsif terhadap permasalahan pengelolaan sampah dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan partisipatif bagi masyarakat.

Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukan kontradiksi antara tindakan yang dilakukan pemerintah dengan semangat yang terkandung dalam UU No. 18 Tahun 2008, ini terindikasi dari rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan beserta stakeholder lainnya terhadap peranannya dalam penanganan persampahan sebagai upaya mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan berwawasan lingkungan, inefektifitas instrumen hukum dalam mengarahkan pola perilaku masyarakat untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan sampah.

5.2.4 Membangun optimalitas Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan uraian diatas menunjukan kadar kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat dalam menangani sampah terletak secara eksplisit pada pengaplikasian paradigma yang tidak lagi akomodatif dan responsif terkait penanganan sampah serta pelaksanaan (*enforcement*) yang belum maksimal terhadap regulasi-regulasi mengenai penanganan sampah. Dalam hal ini perlu adanya sebuah komitmen yang kuat dan terobosan yang bersifat kreatif-inovatif dari semua pihak untuk mengoptimalkan perangkat regulasi mengenai penanganan sampah yang berwawasan lingkungan serta merubah paradigma yang sudah tidak mempunyai relavansi dalam konteks membagun kesadaran pemerintah, *stakeholder* terkait, dan masyarakat dalam menghadapi problematika sampah di negeri ini.

Peran dan partisipasi masyarakat terutama yang berada dibawah garis kemiskinan melalui pelayanan yang lebih responsif sehingga akan menciptakan iklim kesadaran bagi masyarakat pada secara menyeluruh (comprehensive). Hal tersebut tentu harus ditopang oleh bentuk kebijakan yang

Pro Lingkungan dimana setiap proses pembuatan dan pengimplementasian kebijakan tidak boleh dilepaskan dari pengaruhnya terhadap lingkungan sehingga tercipta kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan persampahan dan daya dukung lingkungan. Selanjutnyalandasan yang berbasis pada konsep *Regionalisasi* dimana setiap daerah membangun pola kerjasama strategis antar sektor dengan merumuskan mekainisme pengelolaan dan pembangunan persampahan secara terpadu. Berikutnya adalah upaya mereformasi sumberdaya manusia dan aparatur pemerintahan terkait dengan pengelolaan dan pembagunan sampah yang dimanifestasikan dalam konsep *Good Corporate governance* dan *Real Demand Survey* yang menuntut adanya optimalisasi terhadap aparatur pemeritnah dalam menerapkan prinsip kepengusahaan yang baik dan prinsip pemulihan biaya dalam penyelenggaraan dan pembangunan persampahan serta ceoat tanggap dalam hal mengidentifikasi permasalahan persampahan berdasarkan kebutuhan yang nyata dilapangan. Keseluruhan konsep tersebut tentu saja akan memeberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak apabila ditunjang dengan *Penegakan Hukum* yang kosisten dan kredibel dalam permasalahan pegelolaan dan pembangunan persampahan di negeri ini.

Beberapa langkah strategis dalam mengoptimalkan kebijakan dan merubah paradigma pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut ini:

1. Merevitalisasi konsep desentralisasi layanan persampahan sebagai sarana pendekatan terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat dengan cara pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dan megedepankan peran dan partisipasi aktif

dari seluruh komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.

2. Megembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.

3. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman masyarakat secara intensif dan berkelanjutan (*sustainable*) akan upaya 5R (*reduce, reuse, recycle, recovery, replace*) terkait dengan pengelolaan dan pembangunan persampahan serta mengembangkan dan menerapakan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R.

   Contoh

   a. **Reduce** berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan atau mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Reduce dilakukan dengan cara : kurangi belanja barang-barang yang kamu yang tidak “terlalu” dibutuhkan seperti baju atau celana baru, aksesoris-aksesoris, kurangi penggunaan kertas tissue dengan menggantinya dengan sapu tangan karena akan dapat dipakai ulang dengan mencucinya, kurangi penggunaan kertas di kantor dengan melakukan print preview sebelum mencetak, biasakan membaca koran online, karena semua itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi sampah.
   b. **Reuse** sendiri berarti menggunakan kembali seperti baju lama kamu bisa digunakan kembali dengan merubah model atau menambah kain dari baju-baju bekas yang akhirnya kelihatan menarik dan kamu bisa

pakai kembali atau baju lama kamu bisa kamu berikan kepada orang lain yang membutuhkan.

c. **Recycle** adalah mendaur ulang barang. Paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumahmu, misalnya bekas botol plastik air minum bisa kamu gunakan sebagai pot tanaman, atau kamu bisa juga mendaur ulang kertas bekas untuk digunakan sebagai bahan kerajinan. Pernahkah kamu melihat tempat yang berdampingan dengan tulisan Organik dan Anorganik? Tujuannya adalah sebisa mungkin kamu bisa memisahkan sampah organik (biasa disebut sebagai sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, rumah tangga atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, misalnya sampah dari dapur, sayuran, kulit buah, dan daun. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/ hancur) secara alami. Sedangkan sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan melalui proses yang cukup lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol kaca, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

d. Replace yaitu mengganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Misalnya membawa kantong sendiri saat berbelanja. Cara tersebut efektif untuk mengurangi sampah plastik dari bungkus belanjaan.
e. **Repair** yaitu memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali. dengan langkah tersebut, kamu tak perlu membeli barang-barang baru lagi karena barang lama masih bisa dipakai.

4. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan dengan memaksimalkan pemanfaatan saranamaupun prasarana persampahan.
5. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan dengan cara meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola, meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan, memisahkan fungsi/unit regulator dan operator, serta mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Konsekuensi terhadap pengimplementasian prinsip-prinsip kebijakan dan strategi diatas secara konsisten, terpadu dan menyeluruh tentu saja akan memberikan pegaruh yang positif terhadap peran dan kinerja pemerintah, *stakeholder* terkait, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah saat ini. Dengan konsep dan mekanisme tersebut diharapakan mampu menjadi katalisator bagi setiap komponen masyarakat agar lebih memaksimalkan peranannya dalam menjaga dan

melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pembangunan sampah yang berwawasan lingkungan.

5.2.5 Fenomena **sampah dan ketersediaan petugas kebersihan**

Sampah masih menjadi persoalan utama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Terlebih saat musim penghujan . Tumpukan sampah bisa memicu terjadinya banjir. Sejak masa pemerintahan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto persoalan sampah menjadi momok yang sangat mengwatirkan, banyak keluhan masyarakat terkait sampah sejak November 2018. Tumpukan sampah terus bertambah di saluran-saluran pembuangan. “Ini banyak komplain orang. Baik sebelum (dibersihkan) dan sesudah. Ini sangat luar biasa kotor kalau terus dibiarkan. Bisa jadi penyebab banjir di mana-mana. Hujan pertama datang, sampah sudah menumpuk. Memang mesti jadi perhatian serius ini sejumlah lokasi yang menjadi titik penumpukan sampah dan harus segera ditangani. Seperti satunya di Kecamatan Mariso, Makassar. Mariso merupakan salah satu lokasi di Kota Makassar yang populasi penduduknya cukup padat. Lokasi ini menjadi perhatian khusus. Mengingat penumpukan sampah plastik di drainase dapat mempengaruhi aktifitas keluar masuknya air saat musim penghujan. Jika tidak cepat diatasi, kemungkinan terjadi banjir karena drainase yang tersumbat. “Makanya para petugas yang menangani drainase,selalu siaga untuk di langsung kerahkan untuk setiap saat. Kalau ada laporan atau tidak ada laporan, tetap pantau.para pejabat walikota yang terpilih di Makassar selalu memerintahkan setiap jajarannya melalui camat dan lurah untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Khususnya terkait masalah penumpukan sampah di drainase yang dianggap menjadi biang utama terjadinya banjir. Dengan

proses penanganan dan pembenahan sejak dini, banjir di Makassar akan lebih memudahkan diminimalisasi.

Sementara Satgas untuk kecamtan Rappocini berjumlah kurang lebih 200 orang petugas yang terdiri dari 60 orang petugas Viar untuk penjemput sampah malam hari, 42 petugas Tangkasaki, 33 Petugas Dum Truk, 26 Brigade petugas taman, 30 orang Satgas drainase dan 11 Orang Pengawas Satgas kesemuanya mengelola kebersihan di Wilayah Kecamatan Rappocini.

Hingga pekan kedua di bulan Februari 2018 ini, sopir mobil Tangkasaki, akronim dari Truk Angkutan Sampah Kita belum juga menerima gajinya.

Sopir mobil Tangkasaki yang ditemui BKM, mengakui jika sampai sekarang mereka belum mendapatkan honornya untuk bulan Januari. Padahal, uang tersebut sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi ini dibiarkan terus terjadi dan tidak ada pembayaran gaji, bukan tidak mungkin akan mogok beroperasi.

Untuk itu Kepala kecamatan se-Kota Makassar sudah berupaya mengantisipasi hal ini. Mereka telah mengumpulkan para pegawai honorer dan petugas kebersihannya. Kepadanya diberikan arahan untuk bersabar dan tetap aktif

Untuk Kecamatan Mariso memiliki sembilan unit mobil Tangkasaki. Para petugasnya menerima insentif Rp1 juta per bulan, dengan tunjangan operasional Rp40 ribu per hari.

Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menyebut, sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa setiap hari rerata 1.200 ton. Jumlah tersebut berupa sampah organik dan rumah tangga.

Sekretaris DLH Kota Makassar Andi Iskandar mengklaim, volume sampah yang masuk di TPA Tamangapa sekarang ini sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan kehadiran bank sampah. Dulunya sampah yang masuk ke sana mencapai 1.400 hingga 1.500 ton. Sampah berupa botol atau gelas plastik, kaleng, atau kardus semuanya dipilah lalu dibawa ke bank sampah yang telah terbentuk di masing-masing kelurahan.

“Sampah yang masuk ke TPA Tamangapa setiap harinya merupakan sampah rumah tangga seperti nasi dan daun kering. Tidak bisa lagi didaur ulang. Kalau botol dan gelas plastik, kardus, dan kaleng sekarang dimasukkan ke bank sampah dan ditukar menjadi uang.

Untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa, DLH Kota Makassar terus berupaya memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk sadar akan produksi sampah. Termasuk di dalamnya memanfaatkan sampah menjadi uang dengan menukar sampah plastik, kardus, kertas, dan kaleng ke unit bank sampah di wilayah masing-masing.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah menyerap dan menyediakan ribuan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja sebagai satuan tugas (satgas) kebersihan.

Ribuan satgas kebersihan ini tersebar di 14 wilayah kecamatan, bertugas mengangkut sampah produksi masyarakat, mereka juga setiap harinya melakukan penyapuan sejumlah ruas jalan, utamanya jalan-jalan protokol. jumlah satgas di tiap-tiap kecamatan bervariatif hingga 200 orang. Khusus satgas drainase jumlahnya merata 30 orang per kecamatan.
"Kalau di kecamatan Tamalate satgas kebersihan sekitar 260

orang. Dia menambahkan, saat ini satgas kebersihan sudah menjadi kewenangan penuh pihak kecamatan. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Makassar hanya fokus kepada program penghijauan termasuk pemangkasan pohon. "Mobil tangkasa sendiri sudah menjadi kewenangan kecamatan, kalau BLHD sekarang mengurus TPA dan penghijauan. Kecamatan juga sudah mengurusi taman jalur dan kebersihan," Akhir-akhir ini sampah di Kota makassar menjadi masalah yang semakin serius. Bayangkan saja sampah di Kota Daeng ini bertebaran di mana-mana. Bahkan di tempat umum maupun di sepanjang jalan raya sampah bertebaran di mana-mana. Walaupun telah disediakan tempat sampah di hampir seluruh sudut-sudut kota tetapi tetap saja masalah sampah ini belum teratasi. Dari sudut pandang penulis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah sampah di kota ini.

Yang pertama, status kota Makassar sebagai kota metropolitan yang tidak hanya di Kawasan Indonesia Timur tetapi juga di Kawasan Indonesia keseluruhan mendorong terjadinya arus mobilitasasi penduduk ke Kota Makassar. Ini mengakibatkan kepadatan penduduk Kota Makassar bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk ini berkorelasi langsung terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Selain itu, kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari sampah yang dihasilkan. Parahnya lagi, peningkatan penduduk ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian sampah “buanglah sampah pada tempatnya”.

Yang kedua, Kinerja Dinas terkait yang menangani masalah sampah belum maksimal. Ketidakmaksimalan ini

menurut penulis disebabkan oleh armada yang masih sangat-sangat terbatas, petugas sampah yang masih minim, dan ketidakseimbangan antara jumlah tempat sampah yang tersedia dan banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kendala ini bisa saja ditaktisi dengan melakukan kerja ekstra. Tetapi masalah yang muncul kemudian sampah yang harusnya dipindahkan dari tempat sampah ke TPA pada malam hari, dikerjakan pada siang hari itu akan berdampak pada masyarakat sendiri. Truk sampah yang beroperasi pada siang hari dapat mengganggu masyarakat sebagai pengguna jalan. Dari segi estetika ini juga tidak elok untuk dikerjakan karena bau tak sedap yang dihasilkan sampah itu dapat menjalar kemana-mana. Dampak lain yang ditimbulkan dari masalah sampah ini tidak hanya dari segi lingkungan seperti mengganggu estetika kota, banjir, pendangkalan sungai tetapi juga aspek sosial masyarakat. Masyarakat kota yang cenderung bersikap egoistis, jangankan mau berbagi materi, tempat sampah pun enggan untuk berbagi. Untuk itu, masalah-masalah seperti ini perlu mendapat perhatian oleh seluruh masyarakat karena masalah sampah bukan masalah orang per orang tetapi masalah kita semua.

Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan kerja sama yang baik dari berbagai instansi/lembaga yang kompeten. Seperti yang telah dilakukan oleh TNI yang mengadakan bakti sosial tiap tahunnya untuk membersihkan kanal-kanal di Kota Makassar dari sampah-sampah. Dari Pemkot Makassar sendiri selain menambah tempat sampah perlu juga dilakukan sosialisasi “membuang sampah pada tempatnya”. Karena penambahan fasilitas tanpa dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan membuat usaha-usaha yang dilakukan menjadi percuma. Bagi masyarakat sendiri,

marilah kita menjaga keindahan kota kita yang tercinta ini dengan membuang sampah pada tempatnya..

Di kecamatan Ujung Tanah, pengelolaan sampah sudah dikelola sejak dulu dan telah disosialisasikan kepada masyarakat “Kalau di kecamatan ujung tanah itu memang sejak dari dulu apalagi inikan kita ada pembagian Plastik sampah. Ini yang kita sosialisasikan kita bagi ke masyarakat bahwa ini program yang selama ini berjalan bagaimana kita mendaur ulang itu kembali kita berdayakan bank sampah,” kata Ibrahim, di Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis (14/2/2019). “Program bank sampah sesuai dengan instruksi dari pak wali RT RW ada, minimal RT RW ada melalui itulah sehingga pengurangan sampah melalui daur ulang kita berdayakan ini bank sampah,” sambungnya.Lebih lanjut, ia menambahkan Buku Tabungan Bank Sampah merupakan salah satu aspek dalam penilaian kinerja dan menjadi persyaratan administrasi urusan kepegawaian ASN maupun tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar.Di Kecamatan Ujung Tanah sendiri menargetkan 35 RW telah bertransaksi ke Bank sampah pusat, dan hingga saat ini sudah berjalan sekitar 70%“Bank sampah disetiap kelurahan itu ada 35 RW itu kita targetkan per RW itu kita targetkan minimal ada satu. Setiap RW punya bank sampah satu. Itu sudah berjalan 70% dari 35 berarti sekitar 20 lebih. Sudah bertransaksi ke bank sampah pusat,” pungkas Ibrahim.Kepala SKPD, Dirut Perusahaan Daerah Camat dan Lurah se Kota Makassar mengkoordinir dan memerintahkan pegawai baik itu ASN, maupun tenaga honorer untuk menggunakan botol air minum (Tumbler) di kantor masing-masing,” kata Danny Pomanto dalam surat edaran.

5.2.6 Sinergitas Pengelolaan Persampahan Di Kota Makassar

Dalam hal penyelenggaraan perencanaan pengelolaan sampah melibatkan segenap komponen pada tingkat level grass root yang dimana pada level ini menyangkut para pekerja, sopir, pengawas, kelurahan, kecamatan dan dinas lingkungan hidup, selain itu masyarakat pun diharapkan berpartisipasi dalam hal menjaga lingkungan hidup

Pihak pemerintah kota Makassar melalui Dinas lingkungan hidup, kecamatan dan kelurahan perlu mengupayakan pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan menjadikan masyarakat sadar akan hidup bersih sehingga volume sampah tidak makin bertambah. Pengurangan volume sampah juga dapat dilakukan dengan pengklasifikasian sampah. Hal ini sangat berguna bagi petugas pengangkut sampah, selain memudahkannya ini juga menguntungkan dengan menjadikan sampah sebagai barang ekonomis yang dapat dijual kepada pihak swasta yang dapat didaur ulang oleh kalangan pengusaha atau home industri masyarakat menjadi barang ekonomis yang dapat dijual kepada kalangan masyarakat.

Namun yang menjadi kekurangan dalam hal perencanaan: konsep perencanaan bukanlah merupakan sumbangsih konsep pemikiran gross root, Konsep perencanaan juga tidak melibatkan masyarakat secara luas,sehingga kesadaran dan budaya akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya tidak terbangun, sehingga amat susah menjadikan kota Makassar menjadi kota bersih, kondisi tersebut diperparah dengan minimnya ketersedian container sampah disetiap kelurahan, kalaupun ada jaraknya cukup jauh itupun dengan jumlah terbatas, dari hasil pengamatan, peneliti melihat bahwa penolakan masyarakat tentang container sampah yang berada pada lokasi mereka, hal ini disebabkan bau amis yang ditimbulkan

amat menganggu,sehingga dengan alasan mengganggu kesehatan masyarakat melakukan penolakan,kemudian kendala lain bahwa umumnya tanah tempat penyimpanan container masih dominan milik warga sehingga ketika terjadi penolakan pemerintah tidak berdaya, untuk itu pemerintah perlu membangun perencanaan pengelolaan persampahan dengan melibatkan camat,lurah,tokoh masyarakat RT/RW, akademisi, perwakilan masyarakat guna mencari solusi yang efektif.

Dari hasil observasi dilapangan peneliti melihat keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan hidup bersih,membangun kesadaran dalam hal malu bila area tempat tinggal kotor belum Nampak hal ini terbukti dari banyaknya sampah yang bertebaran di kota Makassar, secara umum untuk daerah publik (jalan raya secara umum bersih) walaupun dalam kenyataan para pekerja sampah harus bekerja extra keras untuk mengamankan area tersebut, secara kasat mata untuk wilayah publik memang terlihat bersih, tetapi untuk daerah kawasan perumahan padat penduduk belum optimal,bila dibandingkan kondisi 10 tahun yang lalu dibawah tahun 2011 armada pengangkut sampah masih terbilang sedikit, sejumlah warga perumahan di lorong lorong sempit mengalami kesulitan dalam membuang sampah sehingga tanah kosong dan ujung lorong menjadi tempat tumpukan sampah, armada pengangkut sampah hanya mampu melayani pada jalur jalur jalan yang dapat dilalui mobil roda 4 sedangkan motor vokuda pengangkut sampah sangat terbilang sedikit (hanya 2 atau 3 motor vokuda milik kecamatan), pada tahun 2019 jumlah motor vokuda pengangkut sampah sudah banyak (1 kecamatan memiliki puluhan kendaraan motor vokuda) sehingga persoalan sampah di lorong atau di jalan setapak kecil sudah mampu

diatasi, meskipun demikian rupanya persoalan sampah masih menjadi momok karena meskipun puluhan armada pengangkut sampah turun, masih tetap dijumpai sampah berserakan dimana mana,

Kesadaran dalam hal pengelolaan persampahan memang bukan mutlak menjadi tanggung jawab dari pemkop semata, melainkan memerlukan keterlibatan segenap kalangan masyarakat,untuk efektivitas dalam sosialisasi hidup bersih perlu dilakukan secara terus menerus, dengan mengajak/melibatkan perwakilan masyarakat setempat untuk berpartisipasi, juga dapat dilakukan melalui perlombaan kampung bersih baik tingkat RT/RW/Kelurahan/kecamatan, ketersediaan bank sampah setiap RW/kelurahan, hal ini akan lebih efektif apabila pemerintah turut terlibat secara terus menerus sehingga menciptakan kebiasaan yang muaranya menjadi budaya yang melekat dalam diri masyarakat luas.

5.2.7 Model Pengangkutan Sampah Wilayah Perumahan

Adanya kebijakan penanganan sampah yang fungsinya di alihkan ke setiap kecamatan,memberi angin segar dalam upaya menjadikan kota Makassar menjadi indah,bersih dan tertata dengan baik, pelayanan sampah yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan menerjunkan armada motor vokuda pengangkut sampah kesejumlah perumahan dalam wilayah kecamatan masing masing, ini berarti tanggung jawab pengangkutan sampah langsung ditangani pihak kecamatan yang di back up oleh pihak kelurahan, sampai saat ini ada juga sejumlah perumahan yang penjemputan sampahnya di kelola oleh pihak RW Perumahan, dimana Pihak RW dan warga menyediakan motor vokuda dan member gaji warga yang bersedia bekerja melakukan penjemputan dari rumah

kerumah, dan sampah tersebut kemudian di buang ke container sampah yang disiapkan oleh pihak kecamatan, untuk membuang sampa ke container dikenakan sejumlah tarif beragam salah satunya sebesar 750.000 perbulan (wawancara Bapak Dg L sopir vokuda Perumahan GA), selain itu pihak RW mengelola pembayaran sampah di satukan dengan biaya keamanan sebesar RP 50.000 Perkeluarga

Untuk perumahan yang berada pada jalur poros, pengangkutan sampah menggunakan mobil truk sampah atau mobil tangkasa, hal ini disebabkan volume sampah terbilang banyak, karena secara umum untuk daerah poros umumnya terdiri dari kantor,toko,rumah mewah,restoran sehingga sampah bervariatif, sedangkan sampah khusus yang mengharuskan diangkut khusus maka ditanggani mobil khusus, untuk itu biaya pengangkutan sampah juga terbilang mahal dan jauh berbeda dengan biaya sampah perumahan sekitar 15000 – 20.000 perbulan.

5.2.8 Model Perencanaan Pengangkutan Sampah Kawasan Kompleks Perumahan

Pengangkutan sampah pada kompleks perumahan tidak sepadat kawasan penduduk padat pada sejumlah lorong dan jalan setapak, adanya pola kesibukan yang luar biasa membuat sampah yang dihasilkan dirumah sangat minim, karena umumnya aktivitas keseharian mereka lebih banyak diluar, Pengangkutan sampah dilakukan dengaan menggunakan motor vokuda (motor tiga roda) dari kelurahan/kecamatan, pada kompleks perumahan umunya dikelolah oleh pihak ketua RW/ RT yang memungut uang iuran sampah dan jasa keamanan (satu paket) dimana jumlah tiap perumahan berbeda satu dengan lain, kisarannya 20.000 – 50.000, salah satu perumahan GA (samaran) di

kota Makassar memungut sebesar 50.000 dengan jumlah keluarga di kompleks tersebut sekitar 200 kepala keluarga, kompleks tersebut memiliki 3 sekuriti tetap dan 2 petugas pengangkut sampah (yang dipilih oleh ketua RW/RT) menurut pengakuan Bapak Dl pengangkut sampah (disamarkan) mereka mengangkut sampah setiap pagi dan siangnya dibuang ke container sampah tidak jauh dari kompleks tersebut,pihak RW/ Rt membayar kepada pengelolah container sebesar Rp 750,000 perbulan, sedangkan Bapak DL mengaku menerima gaji secara rutin perbulan sebesar Rp 1200.000 dan mendapat jatah bensin untuk operasional sebesar Rp 50.000 perminggu

Untuk taraf kesejahteraan para pekerja pengangkut sampah masih sangat terbilang rendah, mahalnya harga harga barang kebutuhan pokok di pasaran membuat nasib pekerja sampah hidup memprihantinkan, senada hal tersebut para pekerja sampah tenaga sukarela dan honorer sopir pengangkut sampah jenis vokuda mendapatkan gaji sebesar Rp 1000.000 dipotong Rp 150.000 (uang jaminan masa tua), sedangkan biaya operasional harian mereka mendapat sebesar Rp 40.000 /perhari dan jatah bensin sebesar Rp 300.000 (per sepuluh hari), sedangkan sopir sampah yang menggunakan mobil pengangkut sampah tangkasa, mereka mendapat tunjangan uang bensin sebesar Rp 1000.000 (per sepulu hari), menurut hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah sopir pengangkut sampah khusus untuk perumahan dan pengangkutan sampah di jalan raya gaji yang mereka dapat belum mampu menopang ekonomi mereka secara umum, kalaupun ada yang memberi dalam bentuk uang tip atau sedekah yang diberikan oleh masyarakat di perumahan atau di jalan raya itu sifatnya tidak tetap artinya bisa ada bisa

tidak ada, namun meskipun demikian prioritas mereka tetap menjadikan wilayah pengangkutan sampah bersih dan indah.

Menurut J (samaran) sopir pengangkut (wilayah kecamatan Rappocini) banyak masyarakat yang tidak mematuhi waktu penjemputan sampah, misalnya sampah tersebut di jemput jam 2 siang tapi ternyata ketika kami tiba disana sampahnya belum ada, hal ini karena kesibukan mereka, atau sampahnya di taruh di dalam halaman , otomomatis kami tidak bisa langsung masuk tanpa se izin pemilik rumah,sehingga komplen ditujukan ke kami padahal mereka yang tidak menaruh sampah diluar pekarangan,yang kedua pihak warga umunya tidak membungkus sampahnya di dalam plastic, sehingga menyulitkan dan memperlambat gerak pengangkutan sampahnya.

Keluhan dari para sopir pengangkut sampah baik dari segi gaji maupun sosialisai tentang pentingnya sampah di bungkus plastic dan menaru pada tempat di lalui pengangkut sampah perlu senantiasa di sosialisasikan dan tugas ini perlu melibatkan dari pihak dinas terkait,kecamatan,kelurahan, Ketua RW/RT dan tokoh tokoh masyarakat serta pendekatan pada warga.menurut salah seorang pakar penanganan persampahan dikota Makassar mengatakan bahwa untuk menjadikan pengelolaan berjalan optimal yang pertama perlu dibangun kesadaran masyarakat dalam bentuk sosialisasi secara terus menerus, menanamkan budaya bersih melalui media pendidikan, pengawasan secara internal melibatkan RW/RT.dan tokoh masyarakat, serta Respon dari pemerintah bila ada keluhan dari masyarakat.

5.2.9 Pengangkutan Sampah Kawasan Perdagangan

Kegiatan sosialisasi oleh pihak kecamatan mengenai wilayah atau daerah bebas sampah pada kasawan

perdagangan dan kawasan bisnis dalam wilayah mereka belum optimal, maka dari itu Dinas lingkungan hidu pharus mencari solusi yang lebih baik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengubah image, kesadaran, dan prilaku masyarakat menuju hidup bersih. Dari hasil observasi sejumlah pasar tradisional, ruas jalan, maupun objek wisata yang ada di kota Makassar masih terlihat sampah-sampah yang berserakan.

Ini menandakan belum efektifnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar. Kondisi lain yang juga sangat mengkhwatirkan terlihat disekitar pusat-pusat perbelanjaan seperti dipusat pertokoan dan mall, walaupun kondisinya lebih baik dari pasar tradisional, akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih saja ada beberapa tumpukan sampah masih sering tampak berserakan baik di depan, di samping (selokan) bangunan ruko dan toko-toko penjualan. Selain itu sejumlah usaha warung dan pedagang kaki lima (PKL) tidak jarang membuang sisa-sisa makanan bahkan dibiarkan menumpuk dan membusuk di sekitar tempat berjualan. Akibatnya, tumpukan sampah ini tidak hanya merusak pemandangan masyarakat lokal tapi juga berimbas pada image buruk di pandangan wisatawan luar.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga ditemukan beberapa kelemahan sistem pengawasan dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi sampah di sekitar pusat pertokoan, pasar tradisional, objek wisata, mall, selain karena kurang optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah , serta faktor budaya penerapan hidup bersih yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih, kontrol terhadap perilaku membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Walaupun pihak Dinas lingkungan hidup merasa telah bekerja optimal, namun sebaliknya kesalahan tersebut masih cenderung

dilimpahkan kepada pemilik toko dan masyarakat swasta lainnya yang dinilai kurang bahkan tidak memiliki kesadaran dalam mewujudkan pola hidup bersih. Meski demikian para pelaku ekonomi juga merasa telah menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang harus membayar retribusi sampah.

Menurut sudut pandang mereka, setelah mereka membayar retribusi maka tanggung jawab penanganan kebersihan dan pengelolaan persampahan telah sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari petugas kebersihan yang telah ditugaskan. Masing-masing dari mereka melakukan pekerjaannya secara sendiri-sendiri. Pelaku ekonomi bekerja hanya terbatas pada kegiatan mengumpulkan sampah-sampah miliknya kemudian dibuang di suatu tempat atau langsung ke TPS, selanjutnya dibawa ke TPA dan sepenuhnya berada dalam tanggung jawab pihak petugas yang berwenang dari pihak kecamatan dan kelurahan

Melihat perbedaan cara pandang dalam melakukan tugas antara para pemilik toko dan petugas dari pihak kecamatan dan kelurahan hanya akan menimbulkan kecendrungan permasalah sampah yang ada di sekitar pusat pertokoan maupun di tempat-tempat lain

Pada kawasan perdagangan sepanjang jalan veteran,urip, alauddin, urip sumohajo,sungai saddang,boulevard dll pengangkutan sampah dilakukan secara door to door dimana masyarakat kawasan tersebut pada pagi dan sore hari telah menaruh sampah yang telah dibungkus kardus plastik tepat depan toko/rumah mereka dan kemudian pihak petugas menjemput keberadaan sampah mereka,sedangkan kawasan industri,kawasan komersial,kawasan khusus dari sumber sampah menjadi tanggung jawab pengelolah kawasan, tetapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan sampah tetap

ditanggani oleh pihak petugas pengangkut sampah berdasarkan wilayah kecamatan dimana tentunya dengan membayar tarif jasa yang berbeda jauh dengan tarif rumah tangga.

Meskipun sebagian besar warga pada kawasan perdagangan telah membuang sampah tepat waktu dan pada tempat yang tepat, tetap saja masih banyak sampah yang terlihat pada siang sampai sore hari. Hal ini dikarenakan pengangkutan sampah yang dilakukan pada pagi hari sering mengalami keterlambatan dengan berbagai persoalan yang terjadi yakni mobil armada pengangkut sampah mengalami kerusakan di tengah jalan sehingga harus diperbaiki, kemacetan lalu lintas di pagi hari, terkadang mobil pengangkut sampah sudah berlalu, masyarakat terlambat menaruh sampah di depan rumah sehingga pada siang sampai sore terlihat sampah yang tidak diangkut, hal ini memberi kesan bahwa pihak pemerintah belum optimal dalam mengatasi kebersihan sampah tersebut.

Dalam perda nomor 4 tahun 2011 menjelaskan untuk sampah yang berada pada fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah atau dari TPS sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun pada kenyataanya persoalan sampah yang ada tidak bisa berdiri sendiri, dibutuhkan semangat bekerjasama sehingga persoalan sampah dapat diatasi, sebagai suatu organisasi pemerintah, dinas lingkungan hidup, pemerintah kecamtan dan kelurahan, bertanggung jawab dalam hal pengangkutan sampah, dan memperkecil volume sampah pada sumbernya, untuk itu perlu keterlibatan pihak lain yakni masyarakat dan pihak swasta. Meski telah ada sinergitas dari pihak kecamatan persoalan sampah masih tetap menjadi kendala hal ini dapat kita buktikan

disejumlah pasar tradisional di kota Makassar boleh dikata 90 persen sampah berserakan dimana mana.

Kendala utama yang dihadapi Pemerntah kota Makassar dalam hal penanganan masalah sampah terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal mematuhi jadwal pembungan sampah, serta banyak masyarakat tidak membungkus sampahnya sehingga hal berdampak pada kecepatan penanganan persampahan konflik pemikiran antara Pemerintah Kota dan masyarakat, dimana mereka cenderung saling menyalahkan. Pihak pemerintah Kota menilai kesadaran masyarakat tentang hidup bersih relatif rendah sehingga membuang atau membiarkan sampah bertumpuk dan berserakan dimana-mana. Sementara itu pihak masyarakat malah menyalahkan Pemerintah Kota yang dinilai elitis, tidak ingin berdialog langsung dengan masyarakat tetapi hanya melalui pihak dinas,kecamatan kelurahan sebagai perantara sehingga masalah TPS dan pengangkutan sampah menjadi sumber kerisauan masyarakat.

Peran dan cara pandang yang berbeda namun tidak pernah didialogkan secara langsung merupakan titik krusial hubungan antara Pemerintah kota dan masyarakat. Pemerintah kota berpandangan bahwa untuk menggalang partisipasi masyarakat tidak mungkin dilakukan dengan cara mengajak semua pihak dalam jumlah yang besar, tetapi cukup dilakukan melalui pendelegasian kewenangan ke pihak kelurahan. Cara pandang tersebut selain menunjukkan kesan ketidak-seriusan dan hanya mencari jalan pintas untuk penanganan masalah sampah justru menimbulkan kesan bahwa Pemerintah kota membangun jarak pemisah dengan masyarakat, Kesadaran masyarakat perlu dibangun melalui sosialisasi yang intens kepada masyarakat, hal ini dapat dibangun melalui media

famlet, informasi tv, spanduk tentang upaya membuang sampah tepat waktu.

Dari ketiga model pengelolaan perencanaan tersebut pemerintah perlu menfokuskan pada kawasan perumahan kumuh, kawasan padat penduduk dan kawasan perdagangan, karena volume persampahan untuk area tersebut sangat banyak.

Pada kawasan perdagangan pemerintah melalui SKPD yakni dinas lingkungan hidupperlu gencar/rutin sekali seminggu untuk giat melakukan sosialisasi melalui microfon suara agar warga dikawasan tersebut perlu membuang sampah tepat waktu.

Para pekerja, pengawas dan sopir yang terlibat dalam penjemputan sampah sangat tahu pola prilaku masyarakat, hal ini disebabkan rutinitas pekerjaan yang senantiasa berulang,

5.2.10 Pengorganisasian Pengelolaan Persampahan Pada Tingkat Operasional Lapangan

Untuk menanggani persampahan dilapangan tidak dibutuhkan orang yang berpendidikan tinggi, hal ini disebabkan tidak ada sarjana yang mau bekerja memunguti sampah secara langsung kemudian diteruskan ke TPA, tetapi untuk tataran manajemen dibutuhkan orang berpendidikan dan cerdas guna mengatur/memanaje sumber daya dalam pengelolaan persampahan.

Pola kordinasi pengelolaan persampahan dilapangan dilakukan oleh pengawas dilapangan, segala keluhan dari pekerja dan sopir langsung berhubungan dengan pengawas, dan bila pengawas tidak dapat mengatasi persoalan mereka akan dilanjutkan ke level pimpinan .

Sosialisasi yang dilakukan hanya bersifat seremoni,dan bukan dianggap sebagai kebutuhan yang mendasar, sehingga aplikasi dari tindakan tersebut belum optimal ,dibutuhkan upaya

dan kegiatan rutin yang menghimbau masyarakat melalui microfon suara, spanduk tentang informasi membuang sampah tepat waktu.

Hal yang takkala pentingnya adalah kordinasi antar SKPD terkait,dalam hal ini dinas lingkungan hidup belum maksimal dalam hal membangun sinergitas dengan dinas yang terkait, seperti dinas PU yang menanggani limbah/sampah disejumlah got dan selokan,dinas pariwisata, dinas disperindag, dinas dinas tersebut perlu membangun sinergitas dalam bentuk perumusan kegiatan bersama,dialog, dan pengembanggan ide ide kreatif untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi sampah di kota Makassar.

Terdapat kekurangan pada dinas lingkungan hidup mulai dari perbaikan manajemen, peningkatan SDM, sarana dan prasarana dan kordinasi baik interen maupun antara SKPD terkait dan juga tak kala pentingnya adalah partisipasi masyarakat.kemudian organisasi akan berjalan efektif apabila semua fungsi berjalan dan tahu apa yang menjadi tugas pokoknya, dibutuhkan kerjasama sehingga tujuan dapat tercapai,untuk itu dibutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan segenap elemen dalam organisasi ini sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal.

Oleh karena itu dibutuhkannya sosok seorang pemimpin yang dapat menjdi motor penggerak dalam organisasi yang dia pimpin, pemimpin yang baik berpengaruh pada sistem dalam organisasi, minimal mengajak koordinasi para kepala bidang dan kepala seksi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan kepemimpinan merupakan masalahrelasi dan pengaruh antara pemimpin danyang dipimpin. Kepemimpinan tersebutmuncul dan berkembang sebagai hasil dariinteraksi langsung di antara pemimpin danindividu-individu yang dipimpin (ada relasiinterpersonal).

Kepemimpinan ini bisaberfungsi atas dasar kekuasaan pemimpinuntuk mengajak, mempengaruhi danmenggerakkan orang-orang lain gunamelakukan sesuatu, demi pencapaian satutujuan tertentu. Raven dan Rubin dalam Yohanes (2004),mengatakan bahwa kepemimpinanseringkali dihubungkan dengan kelompokatau organisasi formal seperti misalnyapartai politik, perusahaan, universitas, atauklub-klub sosial yang teroganisir secaraformal.

5.2.11 Pengarahan

Terkadang dalam memberikan instruksi di lapangan terjadi kendala, katakanlah ada mobil sementara bertugas rusak otomatis kami harus menghubungi mobil lain, namun pada saat bersamaan mobil lain juga sementara beroperasi dapat dipastikan sopir dan pekerjanya akan menolak kalaupun menerima pekerjaan tersebut akan dilaksanakan setelah mereka menyelesaikan tugas pokoknya, sehingga dapat melihat seberapa urjen pekerjaan tersebut, bila memang sudah sangat menganggu, pengawas dapat mengambil keputusan final dengan menyetop pekerja lain dan mengerahkan sejumlah sopir dan pekerja ke tempat tersebut.

5.2.12 Pengawasan dan Pengendalian

Controlling atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi.

Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. Di dalam manajemen perusahaan yang

modern fungsi control ini biasanya dilakukan oleh divisi audit internal.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai: "t*he process by which manager determine wether actual operation are consistent with plans"*.

5.3 **Strategi** Yang Efektif Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Makassar

5.4.4 Pengawasan pada tingkat operasional lapangan

Terdapat banyak keluhan dari sejumlah masyarakat umum, dan sejumlah pihak kantor, sekolah, hotel, rumah sakit yang mengeluhkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah belum maksimal. Kebanyakan mereka mengeluh karena banyak petugas pengangkut sampah bila tidak diberikan tip tambahan mereka enggan / tidak mau mengangkut sampah, sehingga kadang sampai beberapa hari sampah tersebut baru diangkut.

Hal diakui oleh pengawas lapangan, dalam pelaksanaan tugas pengangkutan sampah, banyak sopir / petugas pengangkut sampah melanggar aturan, sehingga pengawas lapangan melakukan pendekatan komunikasi secara intens dengan pendekatan kemanusian / kekeluargaan untuk menyadarkan mereka, bila telah ditegur berkali kali tetap tidak mau ikut aturan maka pengawas lapang menyerahkan penangganannya kepada kepala seksi dan kepala bidang dan bila tetap tidak mau diatur maka persoalan ini akan diteruskan kepada pejabat dinas pertamanan dan kebersihan.

Masih kurangnya kesadaran dan rendahnya peran serta masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani permasalahan

sampah yang terjadi di kota Makassar , tetapi juga upaya persuasif yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidupdalam menggalang dukungan belum optimal. Masalah tentang rendahnya keterlibatan masyarakat dan swasta seharusnya menjadi perhatian dan tanggungjawab Pemerintah Kota Makassar. Dan sudah menjadi tugas pemerintah bagaimana merumuskan sebuah langkah-langkah persuasif serta upaya-upaya yang maksimal agar masyarakat swasta secar sukarela dan penuh kesadaran ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah Kota Makassar dalam penanganan sampah.

Tidak siapnya sistem pengelolaan yang efektif serta lemahnya dukungan dari pihak swasta menjadi faktor lain penyebab permasalahan sampah terjadi di kota Makassar, sehingga progress penanganan sampah justru mengalami titik balik yang cukup mengkhawatirkan. Penyebaran sampah pun mulai tampak kembali di berbagai sudut Kota Makassar. Secara umum peneliti menemukan aspek kelemahan dalam menggalang dukungan untuk membangun kolaborasi/kemitraan dengan pihak swasta, dimana wujud kolaborasi/kemitraan yang dibangun tidak didukung oleh semangat saling menguntungkan secara timbal balik dan bekerjasama satu sama lain.

Sehingga keterlibatan pihak swasta lebih bersifat sukarela sesuai kemampuan dan bukan karena pertimbangan ingin memperoleh keuntungan investasi, Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRTM/2006, pemerintah/ pemerintah kota harus menciptakan iklim yang menarik dan kondusif bagi swasta serta berbagai upaya intensif perlu diciptakan dan dikembangkan agar semakin banyak pihak swasta yang mau terjun dalam bisnis pelayanan publik persampahan.

Peninjauan kembali pedoman dan ketentuan penanaman modal dalam bidang persampahan perlu segera dilakukan untuk mengurangi faktor penghambat dan dapat menarik faktor keuntungan yang

proporsional. Spirit peraturan ini adalah menghendaki agar pemerintah Kota Makassar dapat segera menyusun pedoman investasi yang berorientasi pada semangat swastanisasi dalam beberapa aspek pengelolaan sampah. Jika pihak swasta di berikan peran yang lebih luas dimana terbuka peluang kemungkinan swastanisasi, maka penanganan masalah akan semakin profesional dan efektif.

Proposisi di atas relevan dengan pandangan Obsorne dan Gaebler yang menekankan pada kemungkinan penerapan konsep swastanisasi. Spirit yang sama terungkap pada Pasal 27 Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah dapat membangun kemitraan dengan badan usaha yang dituangkan dalam bentuk kontrak perjanjian. Melalui mekanisme tender, pemerintah daerah memberikan peluang kompetitif kepada pihak swasta untuk menangani aspek tertentu yang telah dipersyaratkan. Sulit dibayangkan bahwa penanganan masalah persampahan di Kota Makassar akan teratasi, jika pihak swasta yang merasakan kembali dampak penanganan masalah persampahan tersebut.

Keterlibatan masyarakat sangat mutlak diperlukan, baik dilakukan secara sukarela maupun karena anjuran atau kewajiban. Keterlibatan sukarela muncul sebagai bentuk kesadaran masyarakat itu sendiri, sehingga pandangan dan opini masyarakat tentang masalah sampah tidak lagi di pandang sebagai tanggung jawab pemerintah saja, namun juga telah menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai warga Negara yang baik dan peduli akan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan diharapkan tumbuh dan menjadi sesuatu hal yang dianggap penting sebagai bagian dari perilaku hidup. Sebab, jika masyarakat sadar dan peduli tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup maka dampak positifnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat itu

sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika masyarakat kurang peduli akan kebersihan lingkungan, maka akibat negatifnya pun akan timbul, seperti lingkungan kotor yang potensial menjadi sumber menyebarnya berbagai wabah jenis peyakit. Dengan demikan, peran serta masyarakat pun mutlak dibutuhkan dalam konteks penanggulangan sampah.

Terbatasnya jumlah aparat dan jumlah dana yang tersedia yang berbanding terbalik dengan meningkatnya volume sampah setiap hari menjadi penyebab utama penanganan masalah persampahan semakin rumit dan kompleks. Dalam rangka mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat, maka pemerintah dituntut melakukan berbagai cara dan upaya agar kiranya masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Partisipasi masyarakat harus diletakkan sebagai komponen utama yang melekat dalam sistem penanganan masalah persampahan.

Masalah sampah sebenarnya bukan hanya terbatas pada penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan alat transportasi sampah, tetapi penanganan sistemik dimana yang menjadi komponen integralnya adalah masyarakat itu sendiri. Contoh sederhananya adalah keterlibatan masyarakat dalam penanganan masalah sampah dan kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan (TPS).

Meskipun pemerintah telah memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya akan tetapi masyarakat tetap saja membuang sampah disembarang tempat maka semua upaya pemerintah itu sia-sia. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah persampahan harus melibatkan peran serta masyarakat melalui sistem pengorganisasian pada tingkat RT dan RW sebagai organisasi yang penting dalam masyarakat untuk mengkordinasikan pengumpulan sampah di pemukiman warga yang tidak memiliki akses jalan yang sempurna.

Kesadaran masyarakat dan keterlibatannya untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah didorong oleh inisiatif dan kemauan mereka sendiri, namun hal tersebut sulit diharapkan. Akan tetapi inisiatif internal tersebut akan efektif dalam rangka membangun budaya bersih secara kolektif di kota Makassar yang memiliki tingkat heterogenitas penduduk yang relatif tinggi dimana lapisan menengah ke bawah merupakan kelas sosial dominan dan menjadi variabel penting yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran internal dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, inisiatif yang diperankan oleh Dinas lingkungan hidupbelum optimal dalam merangsang dan membangkitkan partisipasi publik untuk mencapai kondisi yang diharapkan, masyarakat masih perlu membutuhkan stimulasi dan dukungan pemerintah yang tidak hanya dilakukan pada skala terbatas seperti kegiatan sosialisasi/publikasi melalui rapat.

Peran para tokoh masyarakat sebagai motivator dan pendukung memang sangat penting dan strategis. Justru dengan posisi penting dan strategisnya para tokoh masyarakat maka mereka harus dilibatkan dalam kegiatan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, namun dalam kenyataan justru mereka terabaikan sehingga Dinas lingkungan hidupkota Makassar sampai saat ini kewalahan menanggani persampahan di kota Makassar.

Dinas lingkungan hidupkota Makassar belum maksimal mengajak masyarakat untuk melakukan dialog atau seruan moral melalui media massa apalagi melalui media elektronik. Masyarakat diposisikan sebagai pihak yang hanya menerima kebijakan (objek pembangunan) dari pemerintah tanpa dilibatkan dalam proses dialog yang mungkin saja melalui jalan tersebut dapat ditemukan solusi bersama sehingga masalah penanganan persampahan bisa teratasi.

Berdasarkan aspirasi dari sebagian komponen masyarakat yang terungkap melalui kegiatan wawancara menunjukkan bahwa

masyarakat hanya memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tanpa melakukan praktek langsung di lapangan.

Untuk pemukiman pada wilayah padat penduduk volume sampah dihasilkan tetap besar, banyak warga bila kepepet membuang sampah pada saluran got, hal ini mengakibatkan pada saat hujan turun sejumlah drainese tidak berjalan akibat tertutup timbunan sampah, bila hal demikian terja volume air menjadikan perumahan warga mengalami banjir, untuk saluran got pada sejumlah lorong dan blok maka partisipasi masyarakat dalam bentuk kerja bakti minguan sangat dibutuhkan, berdasarkan observasi peneliti banyak got/dan drainese penuh sampah dan inisiatif dari tokoh masyarakat belum optimal.

Berdasarkan observasi dilapangan banyaknya miss komunikasi tentang kontainer yang dipasang di sejumlah titik tertentu menimbulkan warga disekitar kontainer merasa bahwa hanya mereka yang berhak membuang sampah di kontainer tersebut sedangkan warga lain diluar dari area mereka dilarang membuang sampah dikontainer tersebut.

Hal ini dapat memicu persoalan tersendiri di masyarakat, sosialisasi dari pihak dinas pertamanam dan kebersihan ke kelurahan dan kecamatan belum maksimal sehingga perlu membangun informasi dan sosialisasi yang jelas khususnya masyarakat kawasan padat penduduk bahwa keberadaan kontainer yang dipasang bukan hanya milik warga dalam satu blok rumah melainkan untuk satu kelurahan, dan memang keberadaan kontainer untuk perkelurahan hanya disediakan berkisar 2, 3, 4 kontainer.

5.4 Factor yang dominan dalam pengelolaan persampahan pada Makassar

5.4.1 Optimalisasi fungsi manajemen dalam pengolaan persampahan

Pengelolahan persampahan pada dinas lingkungan hidup membutuhkan perencanaan yang melibatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan , hal ini disebabkan karena sumber sampah berasal dari manusia dan alam, mustahil sampah dimusnakan dari muka bumi tetapi keberadaan dapat diperkecil volumenya, sampah bukanlah musuh, melainkan sahabat bagi kita yang perlu ditata seindah mungkin mulai dari sampah basah, kering, dan sampah special, dalam melibatkan masyarakat hal yang takkala penting adalah keterlibatan dari tokoh tokoh masyarakat setempat yakni RW/RT sangat berperan sebagai orang dekat dengan masyarakat, sehingga tanpa keterlibatan mereka maka apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan tetap terkendala

Dalam pengelolaan dibutuhkan kepemimpinan Haedar dalam orasi ilmianya mengatakan kemajuan suatu organisasi diawali dari pemimpinnya, keberadaan pemimpin diharapkan mampu merencanakan mengorganisasi sampah pada tahapan pengawasan dan pengendalian dengan melibatkan unsur manusia, skill, sarana pendukung serta upaya-upaya sosialisasi secara terus menerus dengan melibatkan masyarakat pada setiap program kegiatan kebersihan, baik secara langsung (terlibat dalam pemeliharaan dan kebersihan lingkungan) tidak langsung (berupa input/sarana melalui media internet/kota)

Dalam proses membangun budaya cinta akan kebersihan dapat dimulai dari pejabatnya, seorang pejabat tidak cukup memerintah tetapi tindakan dengan memberi contoh terlibat langsung dalam gerakan sadar kebersihan akan

mengugah masyarakat tapi hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan (terus menerus).

5.4.2 Pola Kerjasama Dalam Lingkup Pegawai Operasional Kebersihan

Dari hasil observasi lapangan peneliti menemukan pola interaksi kerjasama dalam bentuk hubungan kerja untuk sesame level pekerja operasional lapangan, terbilang harmonis hal ini disebabkan kekerabatan diantara mereka sangat kental karena berasal dari satu daerah yakni daerah bulukumba, sehingga apabila terjadi masalah diantara mereka cenderung diselesaikan secara kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan tersebut terbukti dengan semua pekerja baik pengangkut sampah, sopir adalah keluarga dari pengawas lapangan bapak yang bernama Hamzah, yang mana mereka terdiri dari kemenakan, paman dan saudara sepupu, dan jika para pekerja melanggar mereka tidak tersinggung atau marah bila pengawas lapangan harus mengingatkan para pekerjanya, dan selama bekerja sebagai pengawas mereka tidak pernah membantah setiap penyampaian hal-hal atas instruksi pimpinan, pola kerjasama diantara pengawas lapangan dan pekerja berdasarkan tolong menolong, bila ada diantara keluarga berhalangan bertugas maka pekerja lain yang masih terbilang keluarga akan senang hati membantu kalaupun mereka ada pekerjaan lain, begitu setelah mereka selesai akan segera membantu walaupun harus bekerja sampai larut malam.

5.4.3 Pola Kerjasama Pegawai Administrative dan Pegawai Operasional

Pola interaksi kerjasama antara pegawai administrative dan pegawai operasional lapangan menurut observasi peneliti belum terbangun secara baik, adanya konsep pemikiran yang

menganggap status dan kondisi pekerja lapangan yang cendrung susah nyambung dalam hal komunikasi dan dalam hal penampilan menjadikan para pekerja terkotak kotak, sehingga berbagai permasalahan yang timbul akibat minimnya perhatian pada pegawai operasional lapangan, selain itu keengganan petugas pengangkut sampah menyampaikan uneg uneg dilakukan dalam bentuk tidak maksimalnya pekerjaan yan dibebankan, sehingga respon dari pihak dinas yang mengganggap pekerja mala dan tidak bertanggung jawab terkadang ditanggapi dengan pemikiran negative, padahal berbagai tindakan tersebut adalah merupakan bentuknupaya untuk menarik perhatiansejumlah kalangan untuk lebih memperhatikan nasib nereka yang telah berjasa menjadikan bumi Makassar ini bersih dan aman. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolahan persampahan.

5.4.4 Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat

Untuk membangkitkan partisipasi masyarakat harus dimulai dari tahapan perencanaan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap agenda atau program dalam kegiatan pembangunan disebabkan karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam tahapan demi tahapan kegiatan. Masyarakat merupakan pihak yang mengalami secara langsung dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan sampah. Berbagai masalah yang muncul berikut dengan metode dan teknik penanganannya pun harus melibatkan masyarakat. Oleh karena itu maka sangat logis jika Pemerintah Kota Makassar melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan dan perumusan kebijakan.

Kota Makassar dihuni oleh penduduk dengan latar belakang yang majemuk (plural) dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, profesi, budaya/etnis,

bahasa dan agama. Pluralitas penduduk semakin nyata terlihat ditandai oleh mobilitas dan kesibukan kerja masyarakat yang tinggi. Untuk membangun kesadaran (budaya) kolektif dalam masyarakat seperti itu tampaknya sulit dilakukan melalui pendekatan interpersonal.

Pendekatan yang lazim dilakukan yaitu melalui komunikasi publik dengan memanfaatkan sarana media massa dan media elektronik. Komunikasi melalui media massa bertujuan untuk membangun diskursus publik, karena setiap anggota masyarakat merasa memperoleh ruang dialog secara adil dalam proses perumusan kebijakan dan konsensus yang menyangkut kepentingan bersama.

Bentuk keterlibatan masyarakat tentunya dilakukan melalui berbagai cara diantaranya adalah dengan membuka ruang diskusi publik di sejumlah jaringan media massa dan media elektronik lokal (surat kabar, radio dan televisi), melakukan dialog langsung ke tingkat masyarakat atau membuka saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat memiliki akses langsung kepada instansi terkait agar saran dan kritik dapat disampaikan dengan mudah dan cepat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tentang pengelolahan sampah dan berbagai saluran komunikasi baik melalui jaringan media massa maupun melalui dialog secara optimal. Bukan hanya disebabkan oleh masalah elementer seperti keterbatasan alokasi anggaran atau masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, namun lebih kompleks terkait dengan kebijakan pengelolahan sampah yang cenderung kurang aspiratif terhadap pemikiran dan keinginan masyarakat.

“Berdasarkan hasil observasi pemerintah kota Makassar belum melakukan upaya optimal dalam hal komunikasi publik yang spiritnya mengajak masyarakat untuk memberikan saran, kritik atau pemikiran dalam rangka pembenahan sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar”. Berbagai keluhan, kritik, saran dan pemikiran masyarakat tidak tersalurkan sehingga terdapat kesenjangan komunikasi antara Pemerintah kota Makassar dengan masyarakat umum. Beberapa aspek kelemahan kebijakan penanganan sampah mendapat kritik dari masyarakat namun tidak memperoleh respon dari pihak pemerintah

Beberapa kebijakan pemerintah kota Makassar yang dikritik oleh masyarakat diantaranya adalah terbatasnya jumlah TPS permanen yang mudah diakses oleh masyarakat serta jumlah TPS yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rasio luas dan jumlah rumah tangga yang memproduksi sampah di setiap kelurahan. Masalah lain yang mendapat kritik adalah mengenai fasilitas pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang sering datang terlambat hingga sampah menumpuk selama beberapa hari. Aroma bau busuk pun tidak dapat dihindari sehingga masyarakat keberatan jika TPS ditempatkan di sekitar rumah mereka.

Dari sudut pandang masyarakat, mereka menilai bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan seharusnya turun langsung untuk menampung aspirasi yang berkembang di tingkat masyarakat, sehingga berbagai permasalahan menyangkut penanganan sampah dapat ditemukan solusi yang tepat. Tidak tersedianya saluran komunikasi dalam menyampaikan aspirasi juga menyebabkan masyarakat mengambil inisiatif untuk mengajukan saran melalui pihak kelurahan setempat, sehingga saran yang semestinya disampaikan secara langsung kepada pihak dinas kebersihan, ternyata harus melalui perantara

kelurahan. Dengan alasan kesibukan pula dari pihak masyarakat menyebabkan pihak masyarakat sendiri sering tidak ditindak-lanjuti ke tingkat dinas, sehingga tidak mendapat respon sebagaimana yang diharapkan.

Tampaknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih berorientasi pada kebijakan top down dan lebih mengandalkan mekanisme atau prosedur hirarkis dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu mengandalkan pihak kelurahan untuk ditindak-lanjuti ke tingkat masyarakat. Ketika kebijakan telah dikeluarkan dan instruksi ke tingkat kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi ke masyarakat, maka pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan terkesan lepas tanggung jawab.

Adapun kelemahan mendasar dari sistem pengelolaan sampah adalah kebijakan yang cenderung bersifat instruksional ke tingkat bawah (kelurahan). Beban tugas kelurahan yang demikian kompleks menyebabkan fokus terhadap penanganan masalah sampah tidak dilakukan secara optimal. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab seharusnya memainkan peran lebih besar dan tidak membebani komponen masyarakat dengan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada kelurahan setempat.

Peran pejabat tingkat kelurahan akhirnya menjadi harapan utama dalam upaya mensosialisasikan dan menggalang partisipasi masyarakat agar terlibat dalam kegiatan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dilakukan karena pejabat kelurahan yang memahami kondisi persampahan masyarakat. Pada saat yang sama Dinas lingkungan hidup harus tetap menyadari bahwa peran yang besar masih tetap dipegang oleh mereka sebagai aparat yang berwenang dalam hal menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman tentunya

dengan tetap melibatkan masyarakat,sedangkan kelurahan" harus dimaknai secara proporsional dan tepat. Kelurahan hanya berfungsi sebagai stakeholder pendukung yang secara teknis dilibatkan sebagai front terdepan dalam penanganan terbatas, khususnya berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan masyarakat. Untuk itu, pihak kelurahan hanya terlibat pada urusan teknis seperti sosialisasi mengenai kebijakan memfasilitasi dialog dengan masyarakat dan juga penyalur aspirasi masyarakat.

5.4.5 Komunikasi Dinas lingkungan hidup Dengan Masyarakat

Dinas lingkungan hidup, pihak kecamtan selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan persampahan seyogyanya membangun hubungan yang intens kepada masyarakat dalam hal menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah dan asri, hal yang telah dipahami bahwa persoalan sampah bukan mutlak menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup,pemerintah kecamtan dan kelurahan, melainkan juga merupakan tanggung jawab segenap elemen masyarakatdan juga keterliban pihak swasta sangat dibutuhkan dalam menjadikan sampah sebagai barang yang dapat didaur ulang, rendahnya partisisipasi kalangan swasta untuk mendaur ulang sampah, sedikit banyak dipengaruhi oleh keahlian yang dimiliki, ada kalangan masyarakat yang mampu mengelolah sampah menjadi kebutuhan seperti sandal, ada juga yang mampu menciptakan produk tas, perhiasan dan lain lain, keterlibatan home industri dipengaruhi oleh skill dan pangsaa pasar dari produk tersebut.

Pemerintah kota melalui dinas lingkungan, kecamatan, kelurahan belum memperlihatkan kinerja dengan hasil yang optimal dalam hal membangun komunikasi yang efektif kepada

pihak pihak home industri swasta untuk membangun kemitraaan dalam hal mengurangi volume sampah,dari hasil observasi yang dilakukan peneliti opsi yang peneliti tawarkan adalah pemerintah kota makassar perlu membentuk unit khusus pengolahaan sampah menjadi barang jadi pada setiap kelurahan di kota Makassar, dengan hadirnya unit unit pengolahan sampah pada setiap kelurahan akan berdampak pada pengurangan volume sampah di kota Makassar kehadiran bank sampah di Kota Makassar belum efektif mengatasi persoalan sampah, karena secara umum bank sampah umumnya bertindak sebagai pengumpul untuk diteruskan kepada pihak swasta (Home industri swasta).

Baik bank Sampah maupun penyediaan unit khusus pengolahan sampah menjadi barang jadi pada setiap kelurahan membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas dan hal dapat dilakukan melalui mobilasi yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, RT, RW dan kalangan pendidik, untuk itu melalui komunikasi secara intens kesadaran masyarakat akan mampu tergugah.

Kemudian dari hasil observasi peneliti dari sejumlah pasar di Makassar khususnya pasar tradisional dan rumah makan tradisional Nampak tumpukan sampah yang menganggu kenyamanan walaupun banyak juga pengunjung yang tidak mau peduli atau cuek dengan kondisi tersebut, hal ini sebagai suatu indikasi bahwa masyarakat belum menyadari arti pentingnya menjaga lingkungan untuk bersih,terkadang kita jumpai para pedagang dipasar membiarkan sampah bertebaran di depan toko mereka dengan alasan sibuk melayani pembeli, sedangkan pedagang kaki lima tidak jarang membuang sisa sisa makanan bahkan dibiarkan menumpuk dan membusuk di sekitar tempat berjualan, dampaknya tumpukan sampah tidak hanya merusak pemandangan masyarakat, tetapi juga

berdampak pada image buruk pandangan para wisatawan lokal dan wisatwan asing.

Adapun prilaku masyarakat yang membuang sampah dipagi hari pada sejumlah sudut jalan yang dilalui oleh mobil pengangkut sampah masih terbilang sembrono, sampah yang dipaking dalam kantong plastik umumnya terbuka sehingga aroma sampah menganggu warga yang kebetulan berdomisili dekat wilayah tersebut, belum lagi pemandangan sampah yang terbongkar (berantakan) lantaran digerogoti oleh kalangan hewan liar.

Untuk itu peran sosialisasi dan komunikasi yang efektif yang melibatkan masyarakat setempat sangat dibutuhkan, masyarakat perlu diajak dan dibimbing untuk menata kondisi agar menjadi lebih baik, hanya ada satu cara yakni mengubah pola berpikir masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang efektif sehingga lambat laun menjadi suatu budaya yakni malu bila kotor.

Bila mengacu pada kondisi realitas dilapangan yang ada,kesadaran warga kota Makassar yang terbilang rendah menurut hasil wawancara dengan sejumlah pegawai dinas lingkungan hiduptidak mutlak kesalahan masyarakat, hal ini juga disebabkan upaya persuasif dalam hal komunikasi dengan masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, hal yang seharusnya mendapat fokus utama dinas adalah mencarikan solusi yang tepat dalam hal mengatasi rendahnya kesadaran dalam hal kebersihan, bila kesadaran masyarakat dapat diperbaiki melalui serangkain kegiatan yang sepenuhnya mendapat dukungan dari segenap pihak dan lapisan masyarakat, maka persoalan sampah tentu bukan lagi masalah Crusial.

Adanya kondisi yang tidak siap dalam pengelolaan persampahan dan partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan secara makro menjadi kendala dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Makassar,

5.5 Proposisi

5.5.1 Strategi peningkatan kinerja pegawai

Untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat dilakukan melalui berbagai hal diantaranya pemberian stimulus/motivasi yang secara umum dikenal dalam bentuk kompensasi yang menandai, namun sejalan perkembangan ilmu, motivasi juga mengalami pengembangan diantaranya adalah adanya factor keharmonisan bekerja dan hal dapat diinterfensi oleh stakeholder dalam organisasi tesebut. Pola kerjasama yang harmonis, unsure yang saling menghargai sangat penting dalam pengemangan kinerja pegawai

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 KESIMPULAN

1. Masalah kebersihan lingkungan adalah masalah yang kompleks dan mempunyai pengaruh pada kesehatan masyarakat sehingganya perlu adanya penanganan yang efektif
2. Kebijakan penanggulangan kebersihan yang dilaksanakan selama ini seperti melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan manfaatnya terhadap kesehatan sebagai langkah antisipatif agar timbulnya penyakit dapat dihindari serta dapat memberikan manfaat terhadap keindahan Kota. Namun hal tersebut sepertinya belum maksimal dikarenakan masih banyaknya sampah yang sering dijumpai disekitar kita. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat.
3. Kebijakan Lihat sampah ambil belum efektif berjalan, karena masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya dan belum adanya petunjuk tehnis yang jelas mengenai program ini.
4. Kebijakan Lihat sampah ambil di dukung oleh kebijakan-kebijakan lainnya sebagai pendukung kebijakan yang ada

6.2 REKOMENDASI

1. Dari permasalahan peraturan yang masih lemah usulan rekomendasi adalah Penguatan Penegakan hukum/peraturan bidang persampahan, Sosialisasi dan advokasi peraturan bidang persampahan ke Pemda dan masyarakat serta pihak terkait.
2. Dari permasalahan timbulan sampah usulan rekomendasi adalah Peningkatan penanganan sampah di sumber, Peningkatan penerapan 3R, Pemberian insentif bagi kelurahan dan

kecamatan yang berhasil meningkatkan 3R dan volume sampah yang ditangani di sumber.

3. Pemerintah Kota dan SKPD nya serta Dinas terkait harus saling bersinergi dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan Lihat Sampah Ambil dengan mulai mengimplementasikan kebijakan tersebut mulai dari diri dan lingkungannya.
4. Pemerintah Kota dan SKPD nya serta Dinas terkait harus saling bersinergi dalam mensosialisasikan kebijakan ini dan melakukan evaluasi secara berkala.
5. Kebijakan yang ada harus seiring dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti RT RW perkotaan, serta AMDAL kawasan perkotaan

Jadwal Kegiatan Penelitian Januari S/ D Desember 2019

No	Jadwal	Kegiatan	Keterangan
1	Januari 2019	Pra Penelitian	
2	Februari – April 2019	Pengumpulan data	
3	Mei 2019	Mereduksi data	
4	Juni – Agustus 2019	Pengelolaan data Penelitian	
5	September 2019	Penyajian data Penelitian	
6	Oktober 2019	Uji Materi kelayakan hasil Penelitian	
7	Nopember 2019	PenyempurnaanHasil Penelitian	
8	Desember 2019	Publikasi Hasil Penelitian	

DAFTAR PUSTAKA

Ghiban Alexandra dkk (2005), "*Management of the Waste Materials*", Volume 5, Number 1, May 2012.

Bill Prescott (2012), "*A waste of energy?*", Article IChemE's Milton Keynes regional group in March 2012.

Othman (2013), "*Review on life cycle assessment of integrated solid waste management in some Asian countries*", Journal of Cleaner Production 41 (2013).

Sarah A.Moore (2012), "*Garbage matters: Concepts in new geographies of waste*", journals Permissions Progress in Human Geography 2012.

Assem Al-Hajj and Karima Hamani (2011), "*Material Waste in the UAE Construction Industry: Main Causes and Minimization Practices*", Architectural Engineering And Design Management 2011 Volume 7 221–235.

Trical Yeoh (2011), "*Keep Solid Waste Local*", Article Penang Economic Monthly. Aug 2011.

Walter Alcorn dkk (2012), "*Environmental Issues and Management Strategies for Waste Electronic and Electrical Equipment*", Journal of the Air & Waste Management Association Volume 61 October 2011.

AAAS (2012), "*Garbology 101: Getting A Grip On Waste*", 10 August 668 2012 Vol 337 Science.

Navin dkk (2011), "*Solid Waste Management with Emphasis on Environmental Aspect*", American Institute of Physics 2011.

Lilliana Abarca dkk (2013), "*Solid waste management challenges for cities in developing countries*", Waste Management 33 (2013).

Mulyanto dan Dyah (2010), "*Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja SebagaiVariabel Moderating (Studi Kasus di Dinas Pertanian Tanaman Pangan,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar)*", STIE AUB Surakarta 2010.

Arifin Noor (2012), "*Analisis Kualitas Kehidupan Kerja, Kinerja, dan Kepuasan Kerja Pada CV. Duta Senenan Jepara*", Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012.

Belinda dan Erika (2011), "*Analisis Pengaruh Manajemen Konflik dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. General Adjuster Indonesia*", Binus University 2011.

Yullyanti Ellyta (2009), "*Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai*", Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Sept–Des 2009 ISSN 0854-3844 Volume 16, Nomor 3.

Hasan Suryani (2011), "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur*",Jurnal Ilmu Administrasi Volume VIII No. 3 Desember 2011.

Supiyanto Yudi (2011), "*Hubungan Antara Kedisiplinan Kerja dan Motivasi Kerja Karyawan Dengan Kinerja Karyawan Pada PT. Industri Kemasan Semen Gresik*", Prospektus, Tahun IX Nomor 2, Oktober 2011.

Poylema (2005). "*Link Rage*" LSIC Makassar 19 Agustus 2008.

Seputar Indonesia, *Penanganan Sampah Amburadul*, Makassar 03 September 2012.

Kabar Kami, *Manajemen Kuno Pengolahan Sampah Makassar*, O6 September 2012. Sumber Pendukung

Gitosudarmo dan Mulyono dalam Meyta Indraswari (2011:17) "*Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Dalam*

*Mempengaruhi Kinerja Karyawan***",** Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011.

Mc. Clelland dalam Meyta Indraswari (2011:25) *"Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Mempengaruhi Kinerja Karyawan***",** Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011.

Siagian dalam dalam Shandy (2009:10) "*Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru Smp Negeri Ii Jaten Kab. Karanganyar*" jurnal STIE- "AUB" Surakarta 2009

Lewis dkk dalam Ari Husnawati (2006:24) "*Analisis Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Dan Kepuasan Kerja Sebagai Intervening Variabel*" Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2006

Hasibuan dalam Anwar Hamdani dan Suroto (2007:10) "*Pengaruh Faktor Pengawasan Melekat, Kompensasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Petugas Kebersihan Di Kabupaten Karanganyar Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderating*" 2007

Veithzal Rivai dalam A. Tolkah Mansur (2009:11) "*Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Rotasi Pekerjaan Terhadap Motivasi Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Ditjen Pajak*" Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009

Simamora dalam Ari Husnawati (2006:22) "*Analisis Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Dan Kepuasan Kerja Sebagai Intervening Variabel*" Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2006

Atmo Suprapto dalam Suyanto (2009:58) *"Pengaruh Budaya Organisasi, Pendidikan Dan Latihan, Motivasi Kerja, Profesionalisme Dan*

Kedisiplinan Terhadap Efektifitas Kerja Guru Di Sma Negeri 3 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo" Jurnal [Excellent] | Vol. 1 No. 2 September 2009 Stie Aub Surakarta

Soehardi Sigit dalam Eka Idham Iip K Lewa Dan Subowo (2005:132) "*Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, Cirebon*" Jurnal Edisi Khusus On Human Resources, 2005

Andari (2005),"*Meraih Keunggulan Melalui Pengintegrasian Perencanaan Sumber Daya Manusia Dan Perencanaan Strategik*" Edisi Khusus JSB On Human Resources, 2005.

Gomes, Faustino Cardoso, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta:

Gilles Saint-Paul (1992), "*Technological Choice, Financial Markets and Economic Development*", European Economic Review 34 (1992) 763-781. North

Hendrayanti (2007), "*Analisis Beban Kerja Sebagai Dasar Perencanaan Kebutuhan SDM*", 2007.

Jess Benhabib, Mark M. Spiegel (1994), "*The role of human capital in economic development Evidence from aggregate cross-country data*", Journal of Monetary Economics 34 (1994).

Julia M. Armario, David M. Ruiz, and Enrique M. Armario (2008), "*Market Orientation and Internationalization in Small and Medium-Sized Enterprises*", Journal of Small Business Management 2008 46 (4), pp. 485–511.

Paul Romer (1993), "*Idea gaps and object gaps in economic development*", Journal of Monetary Economics 32 (1993) 543-573. North-Holland.

Paul R. Pintrich & Elisabeth V. De Groot (1990), "*Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic*

Performance", Journal of Educational Psychology 1990, Vol. 82, No. 1,33-40.

Sutrisno, Edi. 2011. *Mnajemen Sumber Daya Manusia.* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Thorvaldur Gylfason (2001), "*Natural resources, education, and economic development*", European Economic Review (2001).

Ulrich, Dave, (2002), "*Human resourcesChampions*", Harvard Business School Press, Boston, 2002.

Barbara A. Fritzsche and Tiffany J. Parrish, "*Theories and Research on Job Satisfaction*" dalam Steven Douglas Brown and Robert William Lent, eds., *Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Baron & Byrne. *Social Psychology : Understanding Human Interaction (6th edition).* USA: Needham Heights Allyn & Bacon Inc. 1994

Daft L. Richard, *Era Baru Manajemen,* Ed. Kanita Maria Tita. Jakarta: Salemba Empat, 2011

Derek R. Allen and Morris Wilburn, *Linking Customer and Employee Satisfaction to the Bottom Line: A Comprehensive Guide to Establishing the Impact of Customer and Employee Satisfaction of Critical Business Outcomes*, Milwaukee : American Society for Quality, 2002

H.C. Ganguli, *Job Satisfaction Scales for Effective Management: Manual for Managers and Sciensts*. New Delhi: Ashok Kumar Mittal, 1994

Kuswadi. 2004. Cara Mengukur Kepuasan Kerja Karyawan. Jakarta : PT ElexMedia Komputindo

Miner, J.B. 1992. Industrial Organizational Psychology. London : Mc Grawhill

Mobley, William. H. 1986. Pergantian Karyawan: Sebab-Sebab Dan Pengendaliannya. Penerjemah : Nurul Iman. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo

Moh. As'ad. 1998. Psikologi Industri. Yogyakarta : LIBERTY

Pandji Anoraga. 1992. Psikologi Kerja. Jakarta : PT RINEKA CIPTA

Paul E. Spector, *Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause, and Consequences* .Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 1997

Phuong L. Callaway, *The Relationship of Organizational Trust and Job Satisfaction: An Analysis in the U.S. Federal Work Force*.Boca Raton: Dissertation.com, 2007.

P. Robbin, Stephen. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta : PT INDEKS kelompok GRAMEDIA

Steve M. Jex, *Organizational Psychology: A Scientist Practitioner Approach*.New York : John Wiley & Sons, 2002

Sutjipto. Kesaksian Seorang Rektor: Siapa Menyuruh Mahasiswa ke Jalan?Jakarta: Global Mahardika Publications.2004

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Wexley, K.N., Yukl, G.A., 1977, *Organizational Behavior and Personal Psychology*, Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illinois.